



## **BERITA ACARA SIDANG PENDADARAN TUGAS AKHIR**

S/UBL/FISIP/0491/VII/26

Pada hari ini, Rabu 22 Juli 2026 telah dilaksanakan Ujian Sidang Pendadaran Tugas Akhir sebagai berikut:

Judul: ANALISIS KEBIJAKAN TEMPORARY PROTECTION DIRECTIVE (TPD) TERHADAP PERLINDUNGAN PENGUNGSI KONFLIK UKRAINA-RUSIA DI POLANDIA

Nama : Raihan Fajar Indarto  
NIM : 1942500388  
Dosen Pembimbing : Anggun Puspitasari, S.I.P, M.Si.

Berdasarkan penilaian pada Presentasi, Penulisan + Metodologi, Penguasaan Materi maka Mahasiswa tersebut di atas dinyatakan:

**LULUS**

dengan nilai angka : **86** huruf : **A**

Mahasiswa tersebut di atas wajib menyerahkan hasil perbaikan tulisan Tugas Akhir dalam bentuk terjilid sesuai dengan Panduan Perbaikan Tugas Akhir, selambat-lambatnya Rabu 05 Agustus 2026.

### Panitia Penguji:

- 1 Ketua Natalia Nadeak, S.I.P, M.Si.
- 2 Anggota Sunten Z Manurung, S.H.
- 3 Moderator Anggun Puspitasari, S.I.P, M.Si.

### Keterangan:

Nilai Huruf: A:85-100 A-:80-84,99 B+:75-79,99 B:70-74,99 B-:65-69,99 C:60-64,99 D:40-59,99 E-:0-39,99



UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN STUDI GLOBAL

Kartu Bimbingan Tugas Akhir

NIM: 1942500388

Nama: Raihan Fajar Indarto

Pembimbing: Anggun Puspitasari, S.I.P, M.Si.

| No. | Tanggal    | Materi                        |
|-----|------------|-------------------------------|
| 1   | 02-04-2026 | Pertemuan 1, konsultasi judul |
| 2   | 05-04-2026 | Review Latar Belakang         |
| 3   | 10-04-2026 | Review Teori                  |
| 4   | 25-04-2026 | Review Bab 1                  |
| 5   | 30-04-2026 | Revisi Bab 1, Outline Bab 2   |
| 6   | 05-05-2026 | Revisi Bab 2                  |
| 7   | 10-05-2026 | Konsultasi data               |
| 8   | 15-05-2026 | Review Bab 3                  |
| 9   | 30-05-2026 | Review Bab 4                  |
| 10  | 15-06-2026 | Revisi Bab 4                  |
| 11  | 05-07-2026 | ACC Sidang                    |



LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Raihan Fajar Indarto  
Nomor Induk Mahasiswa : 1942500388  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Bidang Peminatan :  
Jenjang Studi : Strata 1  
Judul : ANALISIS KEBIJAKAN TEMPORARY PROTECTION DIRECTIVE  
(TPD) TERHADAP PERLINDUNGAN PENGUNGSI KONFLIK  
UKRAINA-RUSIA DI POLANDIA



Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui, disahkan dan direkam secara elektronik sehingga tidak memerlukan tanda tangan tim penguji.

Jakarta, Rabu 22 Juli 2026

Tim Penguji:

Ketua : Natalia Nadeak, S.I.P, M.Si.  
Anggota : Sunten Z Manurung, S.H.  
Pembimbing : Anggun Puspitasari, S.I.P, M.Si.  
Ketua Program Studi : Anggun Puspitasari, S.I.P, M.Si.

**ANALISIS KEBIJAKAN *TEMPORARY PROTECTION DIRECTIVE* (TPD)  
TERHADAP PERLINDUNGAN PENGUNGSI KONFLIK UKRAINA-RUSIA  
DI POLANDIA  
SKRIPSI**



**Raihan Fajar Indarto  
1942500388**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN STUDI GLOBAL  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
JAKARTA  
2026**

**ANALISIS KEBIJAKAN TEMPORARY PROTECTION DIRECTIVE (TPD)  
TERHADAP PERLINDUNGAN PENGUNGSI KONFLIK UKRAINA-RUSIA  
DI POLANDIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Strata Satu (S1) Sarjana Ilmu Hubungan Internasional (S.Hub.Int)  
dalam program Studi Hubungan Internasional**



**Raihan Fajar Indarto  
1942500388**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN STUDI GLOBAL  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
JAKARTA  
2026**



**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN STUDI GLOBAL  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

---

**LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raihan Fajar Indarto

NIM : 1942500388

Program Studi : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Studi Global

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**ANALISIS KEBIJAKAN *TEMPORARY PROTECTION DIRECTIVE* (TPD)  
TERHADAP PERLINDUNGAN PENGUNGSI KONFLIK UKRAINA-RUSIA DI  
POLANDIA**

1. Merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain.
2. Saya izinkan untuk dikelola oleh Universitas Budi Luhur sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jakarta, 7 Juli 2026

**Raihan Fajar Indarto**



**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN STUDI GLOBAL  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

---

**LEMBAR PENGESAHAN**

Setelah dilaksanakannya bimbingan, maka skripsi dengan judul "**ANALISIS KEBIJAKAN TEMPORARY PROTECTION DIRECTIVE (TPD) TERHADAP PERLINDUNGAN PENGUNGSI KONFLIK UKRAINA-RUSIA DI POLANDIA**"

Yang diajukan oleh :

**Nama** : **Raihan Fajar Indarto**  
**NIM** : **1942500388**

Dapat disetujui dan layak untuk dipertahankan dihadapkan Sidang Skripsi Strata Satu (S-1) Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global (FISSIG), Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan.

Jakarta, 7 Juli 2026  
Dosen Pembimbing

**(Anggun Puspitasari, S.I.P., M.Si)**



PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN STUDI GLOBAL  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR

---

LEMBAR PENGESAHAN



Nama : Raihan Fajar Indarto  
Nomor Induk Mahasiswa : 1942500388  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Bidang Peminatan :  
Jenjang Studi : Strata 1  
Judul : ANALISIS KEBIJAKAN TEMPORARY PROTECTION DIRECTIVE  
(TPD) TERHADAP PERLINDUNGAN PENGUNGSI KONFLIK  
UKRAINA-RUSIA DI POLANDIA

Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui, disahkan dan direkam secara elektronik sehingga tidak memerlukan tanda tangan tim penguji.

Jakarta, Rabu 22 Juli 2026

Tim Penguji:

Ketua : Natalia Nadeak, S.I.P, M.Si.  
Anggota : Sunten Z Manurung, S.H.  
Pembimbing : Anggun Puspitasari, S.I.P, M.Si.  
Ketua Program Studi : Anggun Puspitasari, S.I.P, M.Si.



**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN STUDI GLOBAL  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

---

**ABSTRAKSI**

Nama : Raihan Fajar Indarto  
NIM : 1942500388  
Judul : ANALISIS KEBIJAKAN *TEMPORARY PROTECTION DIRECTIVE* (TPD) TERHADAP PERLINDUNGAN PENGUNGSI KONFLIK UKRAINA-RUSIA DI POLANDIA  
Klasifikasi : 5 Bab

Konflik Rusia–Ukraina yang terjadi sejak Februari 2022 telah memicu krisis pengungsi di Eropa, dengan Polandia menjadi salah satu negara tujuan utama. Sebagai respons, Uni Eropa mengaktifkan *Temporary Protection Directive* (TPD) untuk memberikan perlindungan sementara kepada pengungsi Ukraina. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak konflik terhadap krisis pengungsi di Polandia, menjelaskan kondisi sosial-ekonomi pengungsi setelah diterapkannya TPD, serta menganalisis implementasi kebijakan tersebut dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi Ukraina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis menggunakan teori *Human Security*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi TPD memberikan perlindungan hukum serta memperluas akses pengungsi terhadap pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan bantuan sosial sehingga mendukung peningkatan keamanan sosial-ekonomi pengungsi. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti hambatan integrasi, tekanan terhadap layanan publik, dan ketimpangan perlakuan terhadap kelompok pengungsi tertentu.

**Kata Kunci:** *Temporary Protection Directive* (TPD), pengungsi Ukraina, Polandia, Uni Eropa, *Human Security*.



**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN STUDI GLOBAL  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

---

**ABSTRACT**

Name : Raihan Fajar Indarto  
Student ID Number : 1942500388  
Theme of Research : ANALISIS KEBIJAKAN *TEMPORARY PROTECTION  
DIRECTIVE* (TPD) TERHADAP PERLINDUNGAN  
PENGUNGSI KONFLIK UKRAINA-RUSIA DI POLANDIA  
Clasification : 5 Chapters

The Russia–Ukraine conflict, which began in February 2022, triggered a refugee crisis in Europe, with Poland becoming one of the main destination countries for Ukrainian refugees. In response to this situation, the European Union activated the *Temporary Protection Directive* (TPD) to provide temporary protection for Ukrainian refugees. This study aims to describe the impact of the Russia–Ukraine conflict on the refugee crisis in Poland, explain the socio-economic conditions of Ukrainian refugees following the implementation of the TPD, and analyze the implementation of the policy in providing protection for Ukrainian refugees in Poland. This research employs a qualitative descriptive method using a library research approach. The analysis is based on the *Human Security* theory, focusing on the dimensions of economic security and social security. The findings indicate that the implementation of the TPD has provided legal protection and expanded refugees' access to employment, education, healthcare services, and social assistance, thereby contributing to the improvement of their socio-economic security. However, the implementation of the policy continues to face several challenges, including barriers to labour market integration, pressure on public services, and unequal treatment of certain groups of refugees.

**Keywords:** *Temporary Protection Directive* (TPD), Ukrainian refugees, Poland, European Union, *Human Security*.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                       |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ANALISIS KEBIJAKAN TEMPORARY PROTECTION DIRECTIVE (TPD)<br>TERHADAP PERLINDUNGAN PENGUNGSI KONFLIK UKRAINA-RUSIA DI<br>POLANDIA ..... | I                                   |
| LEMBAR PERNYATAAN .....                                                                                                               | II                                  |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                                                                                                               | III                                 |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                                                                                                               | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| ABSTRAKSI .....                                                                                                                       | V                                   |
| ABSTRACT .....                                                                                                                        | VI                                  |
| BAB IPENDAHULUAN .....                                                                                                                | 1                                   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                                              | 1                                   |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                                                                             | 5                                   |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                                                                                           | 5                                   |
| 1.4 Kerangka Penelitian .....                                                                                                         | 6                                   |
| 1.5 Metode Penelitian .....                                                                                                           | 8                                   |
| 1.6 Sistematika Penulisan .....                                                                                                       | 9                                   |
| BAB IIKRISIS KEMANUSIAAN UKRAINA DAN DINAMIKA PENGUNGSIAN KE<br>POLANDIA .....                                                        | 11                                  |
| 2.2 Dinamika Pengungsian ke Polandia .....                                                                                            | 13                                  |
| 2.3 Karakteristik dan Tantangan Pengungsi Ukraina .....                                                                               | 14                                  |
| 2.4 Dampak Sosial-Ekonomi dan Ketimpangan Perlakuan Pengungsi ..                                                                      | 16                                  |
| 2.4.1 Dampak Ekonomi Pengungsian Ukraina terhadap Pengungsi<br>dan Polandia .....                                                     | 18                                  |
| 2.4.2 Dampak Sosial dan Ketimpangan Perlakuan terhadap<br>Pengungsi .....                                                             | 20                                  |
| BAB IIIKEBIJAKAN TEMPORARY PROTECTION DIRECTIVE (TPD) DAN<br>IMPLEMENTASINYA DI POLANDIA .....                                        | 23                                  |
| 3.1 Latar Belakang dan Konsep Temporary Protection Directive (TPD)                                                                    | 23                                  |
| 3.2 Implementasi Temporary Protection Directive (TPD) di Polandia ..                                                                  | 24                                  |
| 3.2.1 Lonjakan Arus Pengungsi Ukraina dan Kebutuhan Respons<br>Kebijakan .....                                                        | 25                                  |
| 3.2.2 Implementasi TPD melalui Kebijakan Nasional Polandia .....                                                                      | 25                                  |
| 3.2.3 Akses Pengungsi terhadap Pekerjaan, Pendidikan, dan<br>Pelayanan Kesehatan .....                                                | 26                                  |
| 3.3 Tantangan Implementasi TPD di Tengah Dinamika Pengungsian ..                                                                      | 27                                  |
| 3.3.1 Perubahan Pola dan Karakteristik Pengungsi Ukraina .....                                                                        | 29                                  |
| 3.3.3 Tantangan Ekonomi dalam Implementasi Temporary<br>Protection Directive (TPD) .....                                              | 33                                  |
| BAB IVANALISA KEBIJAKAN TPD TERHADAP KEAMANAN SOSIAL-EKONOMI<br>PENGUNGSI DI POLANDIA .....                                           | 35                                  |
| 4.1 Dampak Temporary Protection Directive (TPD) terhadap Kondisi<br>Sosial-Ekonomi Pengungsi Ukraina di Polandia .....                | 35                                  |

|                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1.1 Analisis Kebijakan TPD terhadap Economic Security<br>Pengungsi Ukraina .....                                              | 36 |
| 4.1.2 Analisis Kebijakan TPD terhadap Health Security Pengungsi<br>Ukraina .....                                                | 38 |
| 4.1.3 Analisis Kebijakan TPD terhadap Personal Security Pengungsi<br>Ukraina .....                                              | 39 |
| 4.1.4 Analisis Kebijakan TPD terhadap Community Security<br>Pengungsi Ukraina .....                                             | 40 |
| 4.2 Analisis Efektivitas Temporary Protection Directive (TPD) dalam<br>Menjamin Keamanan Sosial-Ekonomi Pengungsi Ukraina ..... | 41 |
| 4.3.1. Perlindungan Hukum dan Legalitas Tinggal .....                                                                           | 45 |
| 4.3.2 Keberhasilan dalam Mendorong Integrasi Pasar Tenaga<br>Kerja .....                                                        | 48 |
| 4.3.3 Keberhasilan dalam Menjamin Akses Pendidikan .....                                                                        | 49 |
| 4.3.4 Keberhasilan dalam Menjamin Akses Pelayanan Kesehatan .....                                                               | 51 |
| 4.3.5 Keberhasilan dalam Menjamin Perlindungan Sosial .....                                                                     | 53 |
| 4.4 Dampak Positif Kebijakan Temporary Protection Directive .....                                                               | 55 |
| 4.5 Tantangan Kebijakan Temporary Protection Directive .....                                                                    | 55 |
| BAB VKESIMPULAN .....                                                                                                           | 58 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                            | 60 |



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Konflik Rusia–Ukraina yang mencapai puncaknya melalui invasi militer Rusia pada 24 Februari 2022 bukanlah konflik yang terjadi secara tiba-tiba. Akar konflik telah berkembang sejak tahun 2014, ketika Rusia menganeksasi wilayah Crimea setelah terjadinya perubahan pemerintahan di Ukraina yang semakin mengarah pada integrasi dengan Uni Eropa dan Organisasi Traktat Atlantik Utara (NATO). Di saat yang sama, konflik bersenjata juga terjadi di wilayah Donetsk dan Luhansk akibat munculnya kelompok separatistis yang didukung oleh Rusia. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan Rusia dan Ukraina terus memburuk hingga akhirnya berkembang menjadi invasi berskala penuh pada tahun 2022. Perang tersebut tidak hanya menimbulkan dampak terhadap stabilitas politik dan keamanan kawasan Eropa, tetapi juga memicu krisis kemanusiaan yang berdampak pada jutaan warga sipil Ukraina.<sup>1</sup>

Invasi Rusia menyebabkan kerusakan infrastruktur, terganggunya pelayanan publik, serta meningkatnya ancaman terhadap keselamatan masyarakat sipil. Situasi tersebut memaksa jutaan warga Ukraina meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari perlindungan ke negara-negara tetangga. Gelombang perpindahan penduduk dalam jumlah besar ini menjadi salah satu krisis pengungsian terbesar di Eropa sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Besarnya arus pengungsi tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan, tetapi juga menjadi tantangan bagi negara-negara penerima dalam menyediakan perlindungan hukum, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta kesempatan kerja bagi para pengungsi.<sup>2</sup>

Di antara berbagai negara tujuan, Polandia menjadi negara yang menerima jumlah pengungsi Ukraina terbesar sejak dimulainya invasi Rusia. Selain berbatasan langsung dengan Ukraina, Polandia memiliki hubungan historis, geografis, ekonomi, dan sosial yang erat dengan Ukraina sehingga menjadi jalur utama bagi masyarakat yang melarikan diri dari wilayah konflik. Posisi geografis tersebut menjadikan Polandia sebagai *frontline state* dalam menghadapi gelombang pengungsian. Di sisi lain, sebagai negara anggota Uni Eropa dan NATO, Polandia juga memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas kawasan

---

<sup>1</sup> Council on Foreign Relations, *Conflict in Ukraine: A Timeline (2022–Present)* (New York: Council on Foreign Relations, 2024).

<sup>2</sup> United Nations High Commissioner for Refugees, *Ukraine Situation Flash Update* (Geneva: UNHCR, 2024).

Eropa Timur. Apabila krisis kemanusiaan tidak ditangani dengan baik, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan instabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan yang dapat memengaruhi kawasan Eropa secara lebih luas.<sup>3</sup>

Selain faktor geografis dan hubungan historis dengan Ukraina, Polandia juga memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan Eropa Timur. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Ukraina serta merupakan anggota Uni Eropa dan NATO, Polandia menghadapi berbagai risiko apabila konflik Rusia–Ukraina terus meluas. Eskalasi konflik berpotensi meningkatkan ancaman terhadap keamanan kawasan, memperbesar arus pengungsi lintas batas, mengganggu stabilitas ekonomi, serta meningkatkan risiko keamanan di wilayah perbatasan Polandia. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi stabilitas politik dan sosial di dalam negeri apabila arus pengungsi tidak dikelola dengan baik.<sup>4</sup>

Dalam perspektif keamanan regional, penerimaan pengungsi Ukraina tidak hanya dipandang sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, tetapi juga sebagai upaya Polandia untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus mendukung kebijakan kolektif Uni Eropa dan NATO dalam merespons dampak konflik Rusia–Ukraina. Dengan memberikan perlindungan kepada para pengungsi melalui implementasi Temporary Protection Directive (TPD), Polandia berupaya mengurangi dampak kemanusiaan akibat konflik sekaligus mencegah munculnya instabilitas yang dapat memengaruhi keamanan nasional maupun kawasan Eropa secara lebih luas.<sup>5</sup>

Migrasi penduduk telah lama menjadi bagian dari dinamika sosial Ukraina, yang pada awalnya berlangsung secara sukarela untuk memperoleh peluang ekonomi dan sosial yang lebih baik. Namun, sejak pecahnya konflik Rusia–Ukraina, pola migrasi tersebut berubah menjadi perpindahan secara paksa akibat ancaman terhadap keselamatan masyarakat sipil. Hingga tahun 2026, UNHCR mencatat lebih dari 5,3 juta pengungsi Ukraina masih berada di berbagai negara di Eropa, dengan Polandia sebagai salah satu negara penerima utama. Masuknya pengungsi dalam jumlah besar menimbulkan tantangan yang kompleks, baik bagi negara penerima maupun bagi para pengungsi itu sendiri. Para pengungsi menghadapi berbagai kesulitan dalam proses adaptasi, seperti hambatan bahasa, akses terhadap pekerjaan dan pendidikan, serta ketidakpastian status hukum yang berdampak

---

<sup>3</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development, *What We Know about the Skills and Early Labour Market Outcomes of Refugees from Ukraine* (Paris: OECD Publishing, 2023).

<sup>4</sup> North Atlantic Treaty Organization, *NATO's Response to Russia's Invasion of Ukraine* (Brussels: NATO, 2024)

<sup>5</sup> European Commission, *Temporary Protection for People Fleeing Ukraine: One Year On* (Brussels: European Commission, 2024)

langsung pada kondisi sosial-ekonomi, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, membangun relasi sosial, dan mempertahankan identitas budaya.

Krisis Pengungsi sendiri dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti kondisi negara yang sedang mengalami konflik, maupun tindakan represif dari pemerintah suatu negara yang pada akhirnya menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat sipil untuk tetap tinggal di negara kebangsaannya. Pada saat ini, Ukraina menjadi salah satu negara yang sedang menghadapi krisis kemanusiaan serta politik. Para masyarakat sipil di Ukraina mengalami berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berupa terbatasnya mereka untuk mendapatkan bahan pangan, air, serta listrik.<sup>6</sup> Selain itu, mereka juga mengalami pembatasan ruang gerak untuk berpindah bahkan pembatasan dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta ekonomi. Konflik yang terjadi di wilayah Rusia-Ukraina turut memberikan dampak terhadap ketidakstabilan politik, ekonomi, hingga pasokan suplai barang dan energi di wilayah Eropa.<sup>7</sup> Tidak dapat dipungkiri ketidakstabilan wilayah Eropa timur juga turut menjadi dampak dari konflik kedua negara tersebut. Meningkatnya ketidakstabilan Eropa Timur turut berimbas pada kesejahteraan masyarakat Eropa Timur maupun negara di sekitarnya. Sehingga para migran dan pengungsi dari Eropa Timur memilih bermigrasi dan menetap di wilayah Eropa Barat khususnya negara anggota Uni Eropa yang memiliki wilayah lebih aman.

Berbeda dengan krisis pengungsi sebelumnya, Uni Eropa menerapkan kebijakan yang bernama *Temporary Protection Directive* (TPD), yaitu kebijakan luar biasa yang memberikan izin tinggal, akses terhadap pekerjaan, pendidikan, serta layanan sosial bagi pengungsi Ukraina hingga tiga tahun ke depan tanpa melalui proses suaka resmi. Kebijakan ini juga mencakup kemudahan seperti akses transportasi umum gratis, layanan komunikasi, dan perjalanan lintas negara tanpa dokumen. Respon positif ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam dinamika kebijakan migrasi Uni Eropa, dimana faktor kedekatan geografis, identitas kultural, dan kepentingan geopolitik berperan besar dalam membentuk kebijakan yang lebih selektif namun strategis terhadap pengungsi Ukraina.<sup>8</sup>

Namun, krisis pengungsi di Eropa juga memperlihatkan ketimpangan perlakuan terhadap pengungsi berdasarkan asal kebangsaan. Sementara pengungsi Ukraina memperoleh perlindungan cepat dan akses luas terhadap fasilitas sosial, pengungsi non-Ukraina justru menghadapi diskriminasi dan kekerasan di berbagai perbatasan, termasuk di Polandia dan Belarus. Mereka kerap

---

<sup>6</sup> International Organization for Migration. (2023). *Ukraine regional response – One year report* (pp. 14–17).

<sup>7</sup> UNHCR. (2022). *Ukraine situation: Regional refugee response plan mid-year update* (pp. 4–6).

<sup>8</sup> Trauner, F. (2022). The EU's response to Ukrainian refugees. *Journal of European Integration*, 4–5.

mengalami penolakan, tindakan represif aparat keamanan, serta kondisi tidak manusiawi di kamp-kamp penampungan seperti di Yunani. Uni Eropa mendapat kritik keras karena gagal menerapkan kebijakan serupa sejak krisis migrasi tahun 2015, yang didominasi oleh pengungsi timur tengah dan Afrika.<sup>9</sup> Kebijakan protektif seperti pembangunan tembok perbatasan dan rendahnya tingkat penerimaan suaka di Polandia, yang hanya sekitar 5,7% pada tahun 2020 mencerminkan pendekatan keamanan (*security approach*) yang masih mendominasi, dimana stabilitas domestik lebih diutamakan dibandingkan prinsip solidaritas dan kemanusiaan.<sup>10</sup> Hal ini memperlihatkan bagaimana dinamika realisme dalam hubungan internasional mempengaruhi pengambilan kebijakan migrasi di kawasan tersebut.

Bagi Polandia, masuknya jutaan pengungsi menjadi tantangan dalam aspek ekonomi, serta sosial, dan politik. Hingga awal tahun 2026, tercatat lebih dari 5,6 juta hingga 5,9 juta pengungsi dari Ukraina di seluruh dunia, dengan sebagian besar masih berada di negara-negara Eropa setelah invasi skala penuh Rusia yang dimulai pada Februari 2022. Di satu sisi, kehadiran pengungsi dapat menambah beban pada infrastruktur publik, pelayanan kesehatan, serta pasar tenaga kerja. Namun disisi lain, mereka juga dapat memberikan kontribusi positif misalnya, dengan mengisi kekurangan tenaga kerja di sektor tertentu dan memperkuat hubungan solidaritas regional Eropa. Respon cepat pemerintah Polandia serta dukungan dari Uni Eropa menunjukkan bagaimana isu kemanusiaan dapat mendorong kolaborasi internasional.<sup>11</sup> Krisis ini tidak hanya menyangkut aspek politik global, tetapi juga menyentuh kehidupan manusia secara nyata. Bagaimana para pengungsi Ukraina berjuang membangun kembali kehidupannya di Polandia menjadi gambaran dari dinamika sosial-Ekonomi pengungsi di Polandia, agar dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan, peluang, serta strategi adaptasi yang dilakukan.

Krisis Kemanusiaan akibat perang Ukraina juga membawa konsekuensi sosial ekonomi yang kompleks bagi negara penerima. Khususnya Polandia. Meski pengungsi Ukraina mendapat prioritas perlindungan dan akses cepat ke pasar kerja melalui *Temporary Protection Directive* (TPD), hal ini menciptakan kesenjangan integrasi sosial dan ekonomi terhadap kelompok pengungsi non Ukraina.<sup>12</sup> Mereka harus melalui proses suaka yang panjang sebelum dapat bekerja secara legal,

---

<sup>9</sup> World Bank. (2023). *Social protection and jobs responses to the Ukraine crisis*. World Bank; Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Economic and social impacts of Ukrainian refugees*. OECD Publishing.

<sup>10</sup> Eurostat. (2021). *Asylum decisions in the EU* (p. 3).

<sup>11</sup> European Commission. (2022). *EU solidarity with Ukraine: Support measures for refugees*.

<sup>12</sup> European Commission. (2022). *Temporary protection for persons fleeing Ukraine*.

yang menyebabkan pengangguran dan kesulitan beradaptasi. Penelitian menunjukkan bahwa penundaan satu tahun dalam proses suaka dapat menurunkan peluang pengungsi memperoleh pekerjaan hingga 4,9%, akibat hilangnya keterampilan dan motivasi. Menurut Hanne Beirens, Direktur *Migration Policy Institute Europe*, kebijakan yang memprioritaskan pengungsi Ukraina turut membatasi sumber daya bagi pengungsi lainnya, seperti perumahan dan kursus bahasa.<sup>13</sup> Kondisi ini menimbulkan sistem dua tingkat (*two-tier system*) dalam integrasi sosial-ekonomi pengungsi di Eropa, yang berpotensi memperlebar ketimpangan dan menantang komitmen Uni Eropa terhadap prinsip kesetaraan dan kemanusiaan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan ini menjadi titik sentral dalam penelitian karena mencerminkan kompleksitas situasi yang dihadapi para pengungsi, baik dalam penyesuaian sosial di lingkungan baru maupun dalam upaya mereka mempertahankan stabilitas ekonomi ditengah keterbatasan yang ada. Selain itu, rumusan masalah ini juga diarahkan untuk mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah Polandia dan dukungan masyarakat internasional berperan dalam membentuk kondisi sosial-ekonomi pengungsi, seta sejauh mana konflik yang terjadi memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan mereka. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai konsekuensi kemanusiaan dari konflik tersebut serta menyoroti pentingnya solidaritas global dalam menghadapi krisis pengungsi di kawasan Eropa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah :

Bagaimana kebijakan Temporary Protection Directive (TPD) mempengaruhi perlindungan serta kondisi sosial-ekonomi pengungsi konflik Ukraina–Rusia di Polandia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini meliputi:

1. Mendeskripsikan konflik antara Rusia dan Ukraina serta dampaknya terhadap munculnya krisis pengungsi di Eropa, khususnya di Polandia.

---

<sup>13</sup> Migration Policy Institute Europe. (2022). *Displaced Ukrainians and the future of European protection*.

2. Mendeskripsikan kondisi sosial-ekonomi pengungsi Ukraina di Polandia setelah diterapkannya kebijakan TPD.
3. Menganalisis implementasi dan efektivitas kebijakan Temporary Protection Directive (TPD) dalam menjamin keamanan sosial-ekonomi pengungsi Ukraina di Polandia.

#### 1.4 Kerangka Penelitian

Dalam Penelitian yang berjudul "*ANALISIS KEBIJAKAN TEMPORARY PROTECTION DIRECTIVE (TPD) TERHADAP PERLINDUNGAN PENGUNGSI KONFLIK UKRAINA-RUSIA DI POLANDIA*" penelitian ini berfokus pada dampak yang ditimbulkan akibat perang Rusia-Ukraina terhadap kehidupan sosial-ekonomi para pengungsi di Polandia. Penelitian ini membahas bagaimana kondisi pengungsi berubah dan beradaptasi, baik dalam aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan integrasi budaya, maupun dalam aspek ekonomi seperti pekerjaan, kewirausahaan, serta kontribusi terhadap perekonomian Polandia. Tingkat analisis penelitian ini berada pada individu dan masyarakat, dengan menyoroti pengungsi sebagai aktor utama yang mengalami dampak krisis sekaligus mempengaruhi dinamika sosial-ekonomi di negara penerima.

Penelitian ini menggunakan *human security* (keamanan manusia) sebagai paradigma utama, karena fokus kajian diarahkan pada perlindungan individu, khususnya pengungsi, dalam menghadapi berbagai ancaman akibat krisis kemanusiaan. Konsep human security sebagaimana diperkenalkan dalam *Human Development Report* UNDP (1994) menekankan bahwa keamanan tidak hanya berfokus pada negara, tetapi juga pada individu sebagai subjek utama yang harus dilindungi dari berbagai bentuk kerentanan, seperti ancaman ekonomi, sosial, kesehatan, dan kesejahteraan hidup secara umum.

Perkembangan kajian human security menunjukkan bahwa pendekatan ini semakin relevan dalam memahami krisis pengungsi kontemporer. Menurut Roland Paris (2016), human security memberikan kerangka analisis yang menempatkan kesejahteraan individu sebagai pusat perhatian dalam kebijakan global.<sup>14</sup> Selain itu, Alexander Betts (2017) menekankan bahwa perlindungan pengungsi tidak hanya bergantung pada kerangka hukum formal, tetapi juga pada kapasitas negara dan kebijakan yang mampu menjamin akses terhadap kehidupan yang layak.<sup>15</sup>

Dalam konteks krisis pengungsi akibat konflik Rusia–Ukraina, pendekatan ini relevan untuk menganalisis bagaimana pengungsi menghadapi berbagai

<sup>14</sup> Paris, R. (2016). *Human security: Theory and practice*.

<sup>15</sup> Betts, A. (2017). *Refuge: Transforming a broken refugee system*. Allen Lane.

tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan keberlangsungan hidup mereka di negara penerima. Elena Fiddian-Qasimiyah (2020) juga menegaskan bahwa pengalaman pengungsi sangat dipengaruhi oleh kebijakan negara penerima yang menentukan akses terhadap pekerjaan, layanan sosial, dan integrasi masyarakat.<sup>16</sup>

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan publik untuk memahami bagaimana kebijakan *Temporary Protection Directive* (TPD) diimplementasikan dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi Ukraina di Polandia. Dalam hal ini, Wayne Parsons (2018) menjelaskan bahwa analisis kebijakan berfungsi untuk menilai hubungan antara kebijakan yang dirumuskan dengan dampaknya terhadap masyarakat.<sup>17</sup> Pendekatan ini membantu mengkaji sejauh mana kebijakan TPD mampu memberikan perlindungan nyata terhadap pengungsi, khususnya dalam aspek sosial-ekonomi seperti akses pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial.

Dalam konteks pengungsian Ukraina di Polandia, kerangka *human security* digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan *Temporary Protection Directive* (TPD) berimplikasi terhadap keamanan sosial-ekonomi pengungsi, termasuk akses terhadap pekerjaan, perumahan, layanan kesehatan, dan integrasi sosial. Dengan demikian, *human security* berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan menilai dampak nyata dari kebijakan terhadap kesejahteraan pengungsi. Untuk melengkapi analisis tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan publik guna mengkaji implementasi kebijakan TPD serta efektivitasnya dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi Ukraina. Melalui kombinasi ini, penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi sosial-ekonomi pengungsi, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu meningkatkan keamanan dan kesejahteraan mereka di Polandia.

Konsep *human security* (keamanan manusia) memusatkan perhatian pada keselamatan dan kesejahteraan individu sebagai aktor utama dalam dinamika global, berbeda dengan pendekatan keamanan tradisional yang berfokus pada negara. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui *Human Development Report* tahun 1994, yang menegaskan bahwa keamanan manusia mencakup tujuh dimensi utama, yaitu keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik. Laporan tersebut menyatakan bahwa "*human security is not a concern with weapons—it is a concern with human life and dignity*," yang menandakan bahwa

---

<sup>16</sup> Fiddian-Qasimiyah, E., et al. (2020). *The Oxford handbook of refugee and forced migration studies*.

<sup>17</sup> Parsons, W. (2018). *Public policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis*. Edward Elgar.

keamanan tidak hanya diukur dari kekuatan militer, tetapi juga dari kemampuan individu untuk hidup aman, bebas dari ketakutan (*freedom from fear*) dan bebas dari kekurangan (*freedom from want*). Dalam penelitian ini, konsep human security digunakan untuk menganalisis kondisi sosial-ekonomi pengungsi Ukraina di Polandia, sementara pendekatan analisis kebijakan digunakan untuk mengkaji bagaimana kebijakan *Temporary Protection Directive* (TPD) mempengaruhi tingkat perlindungan dan kesejahteraan mereka.<sup>18</sup>

Dalam konteks krisis kemanusiaan akibat perang Rusia–Ukraina, konsep Human Security menjadi sangat relevan untuk menjelaskan kondisi para pengungsi yang kehilangan perlindungan dasar, akses terhadap kebutuhan pokok, serta jaminan atas hak-hak mereka sebagai manusia. Menurut *Human Security Handbook* yang diterbitkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, keamanan manusia berfokus pada perlindungan individu dari berbagai ancaman terhadap kehidupan, kesejahteraan, dan martabat manusia, bukan semata-mata pada keamanan negara. Invasi militer Rusia ke Ukraina telah mengakibatkan terganggunya berbagai aspek kehidupan masyarakat sipil, seperti terbatasnya akses terhadap pangan, pelayanan kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesempatan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, implementasi Temporary Protection Directive (TPD) oleh Uni Eropa dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar pengungsi melalui pemberian perlindungan hukum, akses terhadap pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta bantuan sosial. Oleh karena itu, konsep Human Security menjadi landasan yang tepat untuk menganalisis sejauh mana kebijakan TPD mampu menjamin keamanan sosial-ekonomi pengungsi Ukraina selama berada di Polandia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis kebijakan publik untuk mengevaluasi efektivitas implementasi TPD dalam mencapai tujuan perlindungan pengungsi serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul selama pelaksanaannya.<sup>19</sup>

### 1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menyajikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta serta karakteristik fenomena yang diteliti, sehingga pembaca dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap setiap aspek yang dikaji. Dalam hal ini, penelitian difokuskan pada penggambaran dampak krisis kemanusiaan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi pengungsi di Polandia. Data yang digunakan bersifat

---

<sup>18</sup> United Nations Development Programme. (1994). *Human development report 1994* (pp. 22–24). Oxford University Press.

<sup>19</sup> European Commission. (2022). *Temporary protection directive: Operational guidelines* (pp. 3–5).

kualitatif dan termasuk dalam kategori data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, laporan, jurnal ilmiah, buku, serta berbagai sumber tertulis maupun visual lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber yang kredibel, seperti laporan resmi dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), publikasi International Organization for Migration (IOM), dokumen kebijakan dari Uni Eropa terkait Temporary Protection Directive (TPD), data statistik dari World Bank, serta jurnal ilmiah yang diakses melalui database seperti Google Scholar dan ScienceDirect. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan laporan penelitian terdahulu, artikel akademik, serta publikasi lembaga riset yang relevan dengan isu pengungsi dan krisis kemanusiaan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif berbasis studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengelompokkan data ke dalam unit-unit tertentu, menelaah informasi yang dianggap penting, serta menyajikan hasil analisis dalam bentuk uraian yang sistematis dan mudah dipahami. Dengan demikian, berbagai sumber literatur yang digunakan dapat menjadi dasar yang kuat dalam menjawab permasalahan penelitian serta menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I :**

#### **Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang mengapa diangkatnya isu penelitian ini, rumusan masalah sebagai pertanyaan yang akan diangkat, tujuan, kerangka pemikiran, metode dan sistematika penulisan.

### **BAB II :**

#### **Krisis Kemanusiaan Ukraina dan Dinamika Pengungsian ke Polandia**

Bab ini membahas perkembangan konflik Rusia–Ukraina yang memicu krisis kemanusiaan serta arus pengungsian ke negara-negara Eropa, khususnya Polandia. Selain itu, bab ini juga menguraikan karakteristik pengungsi Ukraina serta berbagai tantangan awal yang mereka hadapi di negara penerima.

### **BAB III :**

#### **Kebijakan Temporary Protection Directive (TPD) dan Implementasinya di Polandia**

Bab ini membahas kebijakan *Temporary Protection Directive* (TPD) sebagai respon Uni Eropa dalam

menangani krisis pengungsi Ukraina. Pembahasan difokuskan pada implementasi kebijakan di Polandia, termasuk bentuk perlindungan yang diberikan serta akses pengungsi terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial.

#### **BAB IV :**

#### **Analisis Kebijakan Temporary Protection Directive (TPD) terhadap Keamanan Sosial-Ekonomi Pengungsi Ukraina di Polandia**

Bab ini menganalisis implementasi dan efektivitas kebijakan Temporary Protection Directive (TPD) dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi Ukraina di Polandia dengan menggunakan perspektif *human security*. Analisis difokuskan pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjamin keamanan ekonomi, akses terhadap layanan dasar, serta kesejahteraan pengungsi selama berada di Polandia. Selain itu, bab ini juga membahas berbagai tantangan dan keterbatasan implementasi TPD dalam memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi pengungsi di negara penerima.

#### **BAB V :**

#### **Penutup**

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil temuan-temuan yang sudah diteliti pada pembahasan di bab sebelumnya dan juga berisi saran untuk peneliti selanjutnya.

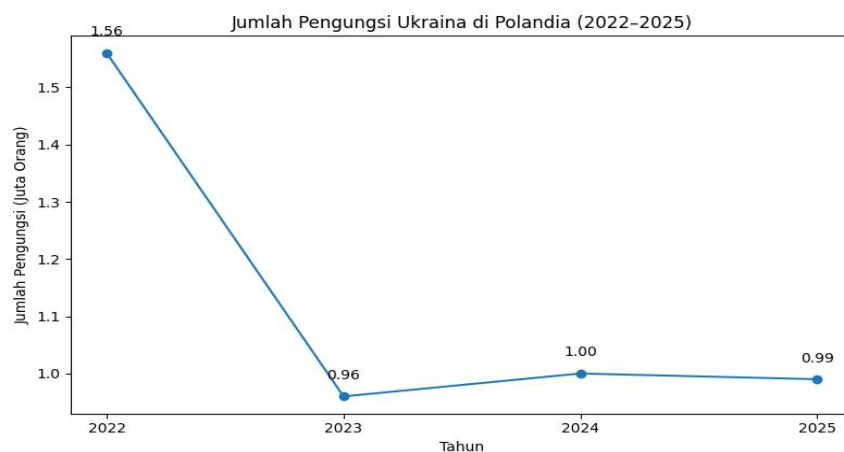
## BAB II

### KRISIS KEMANUSIAAN UKRAINA DAN DINAMIKA PENGUNGSIAN KE POLANDIA

#### 2.1 Konflik Rusia–Ukraina dan Krisis Kemanusiaan

Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung sejak 2014, namun mengalami eskalasi signifikan sejak invasi skala penuh pada 24 Februari 2022 yang memicu krisis kemanusiaan besar di kawasan Eropa. Serangan militer yang masif menyebabkan kerusakan infrastruktur vital, korban sipil, serta terganggunya sistem ekonomi dan sosial di berbagai wilayah Ukraina.<sup>20</sup> Kondisi ini memaksa jutaan warga sipil meninggalkan tempat tinggal mereka demi mencari perlindungan di negara lain. Dalam perspektif hubungan internasional, konflik ini tidak hanya berdampak pada stabilitas kawasan, tetapi juga memunculkan tantangan global dalam penanganan krisis kemanusiaan lintas negara.<sup>21</sup>

Menurut United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), krisis ini telah menyebabkan salah satu gelombang pengungsian terbesar di dunia dalam beberapa dekade terakhir, dengan jutaan warga Ukraina mengungsi ke berbagai negara di Eropa. Pengungsian ini dipicu oleh berbagai faktor, seperti ancaman keamanan, kekurangan pangan, keterbatasan akses pelayanan kesehatan, serta ketidakpastian masa depan. Selain itu, banyak pengungsi terdiri dari perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya yang membutuhkan perlindungan khusus. Situasi ini menunjukkan kompleksitas krisis pengungsi modern yang tidak hanya berkaitan dengan perpindahan fisik, tetapi juga menyangkut aspek perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial.<sup>22</sup>



**Grafik 2.1. Jumlah pengungsi Ukraina di Polandia tahun 2022–2025**

<sup>20</sup> International Organization for Migration. (2023). *Ukraine response report 2023* (pp. 14–17). IOM.

<sup>21</sup> United Nations. (2022). *Humanitarian impact of the war in Ukraine*.

<sup>22</sup> UNHCR. (2024). *Ukraine refugee situation*: United Nations High Commissioner for Refugees.

Konflik antara Rusia dan Ukraina tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik pasca runtuhnya Uni Soviet, yang memicu ketegangan terkait orientasi politik dan keamanan Ukraina antara Barat dan Rusia. Ketegangan tersebut semakin meningkat setelah peristiwa Euromaidan yang berujung pada perubahan pemerintahan di Ukraina dan diikuti oleh aneksasi wilayah Krimea oleh Rusia pada tahun 2014. Selain itu, konflik bersenjata di wilayah Donetsk dan Luhansk turut memperburuk situasi keamanan dan memperpanjang ketidakstabilan di kawasan tersebut. Rangkaian peristiwa ini menjadi latar belakang utama yang menjelaskan mengapa konflik berkembang menjadi krisis berskala besar pada tahun 2022.<sup>23</sup>

Invasi skala penuh yang dimulai pada Februari 2022 mempercepat eskalasi krisis kemanusiaan dengan dampak yang sangat luas terhadap penduduk sipil. Serangan terhadap wilayah perkotaan menyebabkan kerusakan signifikan pada fasilitas publik, seperti rumah sakit, sekolah, jaringan listrik, serta infrastruktur transportasi. Banyak kota mengalami gangguan layanan dasar, termasuk akses terhadap air bersih dan energi, yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Selain itu, meningkatnya jumlah korban sipil serta ketidakpastian situasi keamanan mendorong percepatan arus pengungsian baik secara internal maupun lintas batas negara.<sup>24</sup>

Data dari UNHCR menunjukkan bahwa jutaan warga Ukraina tidak hanya mengungsi ke luar negeri, tetapi juga menjadi pengungsi internal (internally displaced persons/IDPs) di dalam wilayah Ukraina sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa krisis yang terjadi bersifat multidimensi, mencakup perpindahan penduduk dalam berbagai bentuk serta tingkat kerentanan yang berbeda. Pengungsi internal seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap bantuan internasional dibandingkan dengan pengungsi lintas negara, sehingga memperburuk kondisi kemanusiaan secara keseluruhan.<sup>25</sup>

Selain itu, krisis kemanusiaan di Ukraina juga berdampak pada sektor ekonomi secara luas, baik di tingkat nasional maupun regional. Gangguan terhadap aktivitas produksi, distribusi, dan perdagangan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya tingkat kemiskinan. Dampak ini tidak hanya dirasakan di dalam Ukraina, tetapi juga meluas ke negara-negara Eropa melalui gangguan rantai pasok energi dan pangan. Dengan demikian, konflik Rusia–Ukraina tidak hanya menjadi isu keamanan regional, tetapi juga

---

<sup>23</sup> International Organization for Migration. (2023). *Ukraine regional response – one year report*. International Organization for Migration; United Nations. (2022). *Humanitarian impact of the war in Ukraine*. United Nations.

<sup>24</sup> Office of the High Commissioner for Human Rights. (2022). *Report on the human rights situation in Ukraine*. OHCHR.

<sup>25</sup> United Nations High Commissioner for Refugees. (2024). *Ukraine refugee situation*. UNHCR.

berkembang menjadi krisis global yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial di berbagai negara.<sup>26</sup>

## 2.2 Dinamika Pengungsian ke Polandia

Polandia menjadi negara tujuan utama bagi pengungsi dari Ukraina karena beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, kedekatan geografis membuat Polandia menjadi negara terdekat yang dapat diakses dengan cepat oleh warga Ukraina, terutama melalui jalur darat. Kedua, hubungan historis dan sosial antara kedua negara, termasuk keberadaan komunitas diaspora Ukraina di Polandia sebelum konflik, mempermudah proses penerimaan dan adaptasi awal pengungsi. Ketiga, kebijakan pemerintah Polandia yang sejak awal konflik bersifat terbuka, seperti penyederhanaan prosedur masuk dan pemberian akses langsung terhadap perlindungan sementara, turut mendorong meningkatnya arus pengungsi ke negara tersebut.<sup>27</sup> Selain itu, sebagai anggota Uni Eropa, Polandia juga menjadi bagian dari sistem perlindungan regional yang memberikan jaminan akses terhadap berbagai layanan dasar bagi pengungsi. Kombinasi faktor geografis, sosial, dan kebijakan inilah yang menjadikan Polandia sebagai destinasi utama dalam krisis pengungsian Ukraina.<sup>28</sup>



**Gambar 2.2 Jalur Utama Arus Pengungsian Ukraina ke Polandia**

<sup>26</sup> World Bank. (2023). *Social protection and jobs responses to the Ukraine crisis*. World Bank; Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Economic and social impacts of Ukrainian refugees*. OECD Publishing.

<sup>27</sup> United Nations High Commissioner for Refugees. (2024). *Ukraine situation regional refugee response plan 2024*. UNHCR.

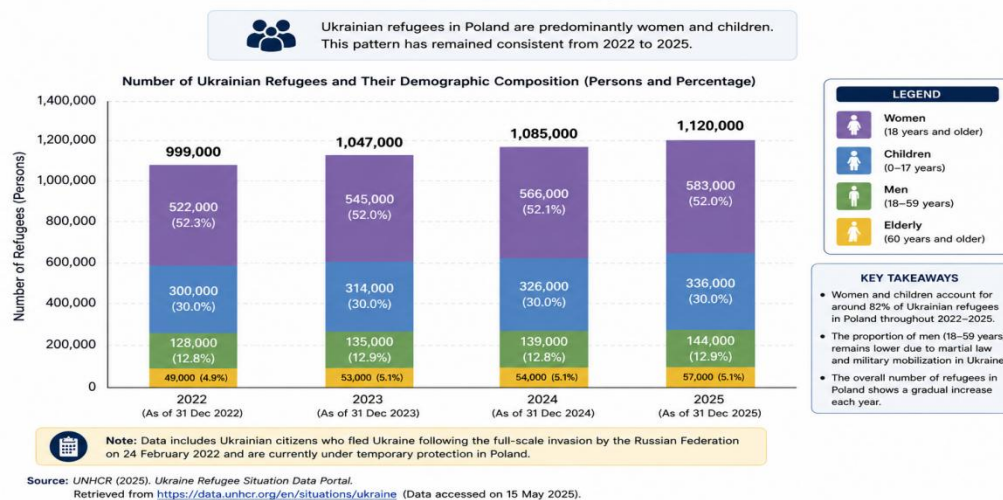
<sup>28</sup> Duszczuk, M., & Kaczmarczyk, P. (2022). The war in Ukraine and migration to Poland. *Intereconomics*, 57(3), 164–170.

Selain tantangan struktural, pengungsi Ukraina di Polandia juga menghadapi berbagai kendala dalam proses adaptasi sosial dan ekonomi di negara penerima. Hambatan bahasa, perbedaan budaya, serta keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak menjadi isu utama yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Di sisi lain, keberadaan pengungsi juga memberikan dampak terhadap dinamika sosial-ekonomi di Polandia, baik dalam bentuk peluang maupun tekanan terhadap sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana dinamika pengungsian ini berkembang serta bagaimana negara penerima merespons tantangan tersebut dalam konteks krisis kemanusiaan yang lebih luas.<sup>29</sup>

### 2.3 Karakteristik dan Tantangan Pengungsi Ukraina

Karakteristik pengungsi Ukraina menunjukkan pola yang khas dibandingkan dengan krisis pengungsi lainnya, terutama dari segi demografi dan latar belakang sosial. Sebagian besar pengungsi yang meninggalkan Ukraina didominasi oleh perempuan, anak-anak, dan lansia, karena kebijakan mobilisasi militer yang mengharuskan laki-laki usia produktif untuk tetap tinggal di negara tersebut. Kondisi ini menciptakan struktur populasi pengungsi yang rentan dan membutuhkan perlindungan khusus, terutama dalam aspek keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, banyak di antara mereka berasal dari wilayah perkotaan yang terdampak langsung oleh konflik bersenjata.<sup>30</sup>

**Figure 2.3 Demographic Composition of Ukrainian Refugees in Poland, 2022–2025**  
(As of 31 December each year)



### Gambar 2.3 Komposisi demografis pengungsi ukraina di Polandia tahun 2022-2025

<sup>29</sup> OECD. (2023). *What we know about the skills and early labour market outcomes of refugees from Ukraine*.

<sup>30</sup> UNHCR. (2023). *Ukraine situation: Regional refugee response plan*.

Dari segi pendidikan dan keterampilan, pengungsi Ukraina umumnya memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi dibandingkan dengan kelompok pengungsi dari kawasan lain. Banyak dari mereka memiliki latar belakang pendidikan menengah hingga tinggi serta pengalaman kerja di berbagai sektor profesional. Hal ini menjadi potensi penting dalam proses integrasi ke pasar tenaga kerja di negara penerima, termasuk Polandia. Namun demikian, pengakuan kualifikasi pendidikan dan keterampilan tersebut seringkali menjadi tantangan tersendiri karena perbedaan sistem sertifikasi dan regulasi ketenagakerjaan antar negara.<sup>31</sup>

Selain aspek demografis dan pendidikan, kondisi psikologis pengungsi Ukraina juga menjadi karakteristik penting yang perlu diperhatikan. Banyak pengungsi mengalami trauma akibat paparan konflik, kehilangan anggota keluarga, serta ketidakpastian masa depan yang mereka hadapi. Situasi ini berdampak pada kesehatan mental dan kemampuan mereka untuk beradaptasi di lingkungan baru. Oleh karena itu, kebutuhan akan layanan dukungan psikososial menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan pengungsi, selain pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal dan akses layanan kesehatan.<sup>32</sup>

Di sisi lain, karakteristik pengungsi Ukraina juga ditandai oleh adanya mobilitas yang tinggi dan kecenderungan untuk kembali ke negara asal apabila situasi memungkinkan. Banyak pengungsi yang tidak memandang perpindahan mereka sebagai migrasi permanen, melainkan sebagai langkah sementara untuk menyelamatkan diri dari konflik. Hal ini mempengaruhi pola integrasi mereka di negara penerima, termasuk dalam hal partisipasi di pasar kerja, pendidikan, dan kehidupan sosial. Dengan demikian, pemahaman terhadap karakteristik ini menjadi penting bagi negara penerima dalam merancang kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika kebutuhan pengungsi.<sup>33</sup>

Di Polandia, para pengungsi dari Ukraina dihadapkan pada berbagai tantangan awal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta proses adaptasi di lingkungan baru. Salah satu permasalahan utama adalah ketersediaan tempat tinggal yang memadai, mengingat jumlah pengungsi yang datang dalam waktu singkat sangat besar dan melebihi kapasitas infrastruktur yang tersedia. Banyak pengungsi pada tahap awal harus tinggal di tempat penampungan sementara, fasilitas umum, maupun bersama keluarga lokal yang memberikan

---

<sup>31</sup> OECD. (2023). *What we know about the skills and early labour market outcomes of refugees from Ukraine*.

<sup>32</sup> OECD. (2023). *What we know about the skills and early labour market outcomes of refugees from Ukraine*.

<sup>33</sup> European Commission. (2023). *Temporary protection for people fleeing Ukraine: Operational guidelines*.

bantuan secara sukarela. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun respons awal Polandia tergolong cepat dan terbuka, tekanan terhadap sistem penerimaan tetap tidak dapat dihindari.<sup>34</sup>

Selain perumahan, akses terhadap layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan juga menjadi tantangan penting bagi pengungsi Ukraina. Sistem pelayanan kesehatan di Polandia harus menyesuaikan diri dengan peningkatan jumlah pasien secara signifikan, termasuk kebutuhan pelayanan kesehatan darurat maupun jangka panjang. Di sektor pendidikan, masuknya anak-anak pengungsi ke dalam sistem sekolah nasional menuntut adanya penyesuaian kurikulum, bahasa pengantar, serta dukungan psikologis bagi siswa yang terdampak konflik. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi pengungsi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut kesiapan institusi sosial dalam menerima perubahan yang terjadi secara cepat.<sup>35</sup>

#### **2.4 Dampak Sosial-Ekonomi dan Ketimpangan Perlakuan Pengungsi**

Arus pengungsian warga Ukraina ke Polandia sejak dimulainya invasi Rusia pada Februari 2022 telah menciptakan berbagai konsekuensi yang tidak hanya bersifat kemanusiaan, tetapi juga sosial dan ekonomi. Masuknya jutaan pengungsi dalam waktu yang relatif singkat menjadikan Polandia sebagai salah satu negara yang menghadapi tekanan terbesar dalam merespons krisis pengungsian di Eropa. Situasi ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari penyediaan layanan publik, kebutuhan perumahan, sistem pendidikan, hingga kondisi pasar tenaga kerja. Dengan jumlah pengungsi yang sangat besar, pemerintah Polandia dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan pengungsi dan menjaga stabilitas sosial-ekonomi domestik.

Dari perspektif ekonomi, kehadiran pengungsi Ukraina memberikan dampak yang bersifat kompleks. Di satu sisi, pengungsi berpotensi menjadi sumber daya manusia yang dapat membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi Polandia. Banyak pengungsi yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang relatif tinggi sehingga berpotensi berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi negara penerima. Namun disisi lain, peningkatan jumlah penduduk secara mendadak juga menimbulkan kebutuhan tambahan terhadap layanan publik, bantuan sosial, serta penyediaan lapangan kerja yang memadai. Oleh karena itu, dampak ekonomi dari arus pengungsian tidak hanya

---

<sup>34</sup> UNHCR. (2023). *Ukraine situation: Regional refugee response plan*.

<sup>35</sup> UNICEF. (2023). *Education response for Ukrainian refugees*; WHO. (2022). *Health system response to the Ukraine crisis*.

dapat dipahami sebagai beban atau keuntungan semata, melainkan sebagai proses yang menghasilkan berbagai konsekuensi positif dan negatif secara bersamaan.<sup>2</sup>

Selain aspek ekonomi, dinamika sosial yang muncul akibat kehadiran pengungsi juga menjadi isu yang penting untuk diperhatikan. Pada tahap awal krisis, masyarakat Polandia menunjukkan tingkat solidaritas yang sangat tinggi terhadap para pengungsi Ukraina melalui berbagai bentuk bantuan kemanusiaan, seperti penyediaan tempat tinggal sementara, bantuan logistik, serta dukungan sosial. Dukungan tersebut memperlihatkan adanya kedekatan historis dan geografis antara kedua negara yang mendorong penerimaan masyarakat terhadap pengungsi. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan berlanjutnya konflik di Ukraina, muncul berbagai tantangan baru yang berkaitan dengan proses integrasi sosial, termasuk adaptasi budaya, penggunaan bahasa, serta potensi persaingan dalam memperoleh akses terhadap sumber daya dan layanan publik.

**Table 2.4 Socio-Economic Impacts and Inequalities in the Treatment of Ukrainian Refugees in Poland (2022–2025)**

| DIMENSION                                                                                                              | INDICATOR                                                         | 2022<br>(First Year of TPD) | 2023         | 2024         | 2025<br>(As of May 2025) | SOCIO-ECONOMIC IMPACTS<br>(Poland)                                                                                                                                                                                                             | INEQUALITIES / CHALLENGES<br>IN TREATMENT                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Labour Market and Employment</b> | Number of employed Ukrainian refugees (persons)                   | 74,800                      | 297,000      | 681,000      | 950,000                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Helped fill labour shortages in sectors such as manufacturing, logistics, construction, and services.</li> <li>Contributed to economic growth through increased consumption and tax revenue.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Many work in low-skilled and low-paid jobs.</li> <li>Difficulty in recognition of qualifications limits access to better employment.</li> </ul>  |
|                                                                                                                        | Employment rate (among working-age refugees)                      | 14%                         | 34%          | 48%          | 55%                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |
|  <b>Education</b>                   | Ukrainian refugee children enrolled in Polish schools             | 194,000                     | 207,000      | 215,000      | 225,000                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Increased school diversity and international experience.</li> <li>Government received additional funding from EU to support education services.</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Language barriers and curriculum differences.</li> <li>Unequal access to quality education across regions (urban vs. rural areas).</li> </ul>    |
|                                                                                                                        | Share of total students among refugee children                    | 61%                         | 62%          | 63%          | 64%                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |
|  <b>Healthcare</b>                  | Number of refugees using public healthcare services (approx.)     | 1.2 million                 | 1.8 million  | 2.1 million  | 2.3 million              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Strengthened demand for health services and supported additional funding for the health system.</li> <li>NGO and international support expanded mental health programs.</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Long waiting times in some regions.</li> <li>Mental health services still insufficient, especially for women and children.</li> </ul>            |
|                                                                                                                        | Access to mental health services                                  | Limited                     | Expanding    | Improved     | Further improved         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |
|  <b>Housing</b>                     | Refugees receiving accommodation support (approx.)                | 1.1 million                 | 1.0 million  | 960,000      | 910,000                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stimulated the rental market and local economies.</li> <li>Increased construction and renovation in some areas.</li> </ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>High housing costs in major cities.</li> <li>Over-reliance on private sponsorship and uneven distribution across regions.</li> </ul>             |
|                                                                                                                        | Share living in private accommodation                             | 85%                         | 80%          | 76%          | 72%                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |
|  <b>Social Assistance</b>           | Refugees receiving social assistance (approx.)                    | 1.3 million                 | 1.15 million | 1.05 million | 980,000                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reduced extreme poverty risks among refugees.</li> <li>Supported local communities through government and EU funding.</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Differences in access to benefits between regions.</li> <li>Vulnerable groups (elderly, people with disabilities) face more barriers.</li> </ul> |
|                                                                                                                        | Share of total refugees                                           | 68%                         | 59%          | 54%          | 49%                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |
|  <b>Social Integration</b>          | Share of refugees feeling socially accepted in local communities* | 64%                         | 66%          | 68%          | 70%                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Strong civil society engagement fosters social cohesion.</li> <li>Cultural exchange enriches Polish society.</li> </ul>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cases of discrimination and xenophobia still exist.</li> <li>Integration progress varies between regions and communities.</li> </ul>             |

\*Based on survey data from Polish public opinion research and international organizations.  
Source: UNHCR (2025) Ukraine Refugee Situation Data Portal; Statistics Poland (GUS) (2025); IOM (2025) Poland – Ukraine Response; OECD (2024) The Socio-Economic Impact of Ukrainian Refugees in Poland.  
Notes: TPD = Temporary Protection Directive (activated by the EU in March 2022). Data for 2022 refers to the period March–December 2022.

## Gambar 2.4 Dampak Sosial Ekonomi dan Ketimpangan Perlakuan Pengungsi

Di samping dampak sosial-ekonomi tersebut, krisis pengungsi Ukraina juga memunculkan perdebatan mengenai adanya ketimpangan perlakuan terhadap kelompok pengungsi yang berbeda. Banyak pengamat menilai bahwa respons negara-negara Eropa terhadap pengungsi Ukraina jauh lebih cepat dan terbuka dibandingkan respons terhadap pengungsi dari kawasan Timur Tengah dan Afrika pada krisis migrasi sebelumnya. Perbedaan perlakuan ini terlihat dari kemudahan

akses masuk ke wilayah Uni Eropa, pemberian izin tinggal sementara, akses terhadap pekerjaan, serta berbagai bentuk bantuan sosial yang diberikan kepada pengungsi Ukraina. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan prinsip-prinsip kemanusiaan dan non-diskriminasi dalam tata kelola pengungsi internasional.

Berbagai dinamika tersebut menunjukkan bahwa krisis pengungsi Ukraina di Polandia tidak hanya berkaitan dengan upaya penyelamatan dan perlindungan korban konflik, tetapi juga menyangkut proses adaptasi sosial, integrasi ekonomi, serta tantangan politik yang muncul di negara penerima. Oleh karena itu, untuk memahami dampak pengungsian secara lebih komprehensif, pembahasan pada bagian ini akan dibagi ke dalam dua aspek utama, yaitu dampak ekonomi yang berkaitan dengan pasar tenaga kerja dan kesejahteraan pengungsi, serta dampak sosial yang mencakup proses integrasi sosial, hubungan dengan masyarakat lokal, dan ketimpangan perlakuan terhadap kelompok pengungsi tertentu.

#### **2.4.1 Dampak Ekonomi Pengungsian Ukraina terhadap Pengungsi dan Polandia**

Dalam aspek ekonomi, tantangan utama yang dihadapi pengungsi Ukraina berkaitan dengan akses terhadap pasar tenaga kerja. Meskipun sebagian pengungsi memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang relatif tinggi, mereka tetap menghadapi hambatan seperti perbedaan bahasa, keterbatasan pengakuan kualifikasi profesional, serta kurangnya informasi mengenai peluang kerja di negara penerima. Kondisi ini menyebabkan sebagian pengungsi bekerja pada sektor informal atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan dan pengalaman yang mereka miliki. Menurut berbagai studi internasional, sebagian besar pengungsi Ukraina yang tiba di negara-negara Eropa memiliki latar belakang pendidikan yang relatif tinggi. Namun, banyak dari mereka mengalami fenomena *deskilling*, yaitu bekerja pada posisi yang berada di bawah tingkat kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki akibat hambatan bahasa, regulasi profesi, dan kesulitan adaptasi terhadap pasar kerja lokal.<sup>36</sup>

Bagi para pengungsi, akses terhadap pekerjaan menjadi faktor penting dalam membangun kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan kemanusiaan. Kemampuan memperoleh pekerjaan memungkinkan pengungsi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, memperoleh tempat tinggal yang lebih layak, serta meningkatkan stabilitas sosial-ekonomi keluarga mereka selama berada di Polandia. Selain berfungsi sebagai sumber

---

<sup>36</sup> Polish Economic Institute. (2024). *Refugees from Ukraine in the Polish labour market: Opportunities and obstacles*.

pendapatan, pekerjaan juga menjadi sarana integrasi sosial karena memungkinkan pengungsi berinteraksi dengan masyarakat lokal dan membangun jaringan sosial yang lebih luas. Tingkat partisipasi pengungsi Ukraina dalam pasar tenaga kerja Polandia tergolong tinggi dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Data dari Polish Economic Institute menunjukkan bahwa sekitar 65% pengungsi Ukraina di Polandia telah bekerja, menjadikan Polandia sebagai negara dengan tingkat ketenagakerjaan pengungsi Ukraina tertinggi di antara negara-negara OECD. Sementara itu, survei IOM pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 67% pengungsi usia kerja telah memperoleh pekerjaan, sedangkan studi UNHCR dan Deloitte pada tahun 2025 mencatat bahwa 69% pengungsi usia kerja telah bekerja, hanya sedikit di bawah tingkat pekerjaan warga Polandia yang mencapai 75%.<sup>37</sup>

Di sisi lain, kehadiran pengungsi Ukraina memberikan dampak ekonomi yang bersifat ambivalen bagi Polandia. Dalam jangka pendek, peningkatan jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap perumahan, layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Pemerintah Polandia harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk memastikan kebutuhan pengungsi dapat terpenuhi tanpa mengurangi kualitas pelayanan bagi masyarakat lokal. Di beberapa kota besar seperti Warsawa, Kraków, dan Wrocław, peningkatan permintaan terhadap tempat tinggal bahkan menyebabkan kenaikan harga sewa serta memberikan tekanan terhadap kapasitas layanan publik. Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan berbagai program bantuan sosial dan dukungan finansial bagi kelompok pengungsi yang rentan, terutama perempuan dan anak-anak yang mendominasi populasi pengungsi Ukraina di Polandia.<sup>38</sup>

Dalam jangka menengah dan panjang, pengungsi Ukraina juga berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Polandia. Masuknya tenaga kerja baru membantu mengatasi kekurangan pekerja di beberapa sektor seperti manufaktur, jasa, konstruksi, logistik, perdagangan, dan perawatan. Sebelum invasi Rusia pada tahun 2022, Polandia telah menghadapi tantangan demografis berupa menurunnya jumlah penduduk usia produktif dan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi. Kehadiran pengungsi Ukraina membantu mengisi kekosongan tersebut dan mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi nasional. Data UNHCR dan Deloitte menunjukkan bahwa keberadaan pengungsi Ukraina memberikan kontribusi sekitar 2,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Polandia pada tahun 2024. Studi yang sama juga menemukan bahwa

---

<sup>37</sup> International Organization for Migration. (2024). *Poland: Economic inclusion and livelihoods of refugees from Ukraine (October–December 2024)*.

<sup>38</sup> United Nations High Commissioner for Refugees. (2025). *Refugees generated a stunning 2.7 percent of Poland's GDP in 2024, study shows*.

masuknya pengungsi ke pasar tenaga kerja tidak menyebabkan peningkatan pengangguran atau penurunan upah pekerja lokal, melainkan berkontribusi pada peningkatan produktivitas perusahaan dan tenaga kerja di Polandia.<sup>39</sup>

Selain berkontribusi melalui pasar tenaga kerja, pengungsi Ukraina juga memberikan dampak ekonomi melalui aktivitas konsumsi. Pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, transportasi, pendidikan, dan perumahan turut meningkatkan permintaan domestik dan mendorong perputaran ekonomi lokal. Dengan semakin banyaknya pengungsi yang memperoleh pekerjaan dan penghasilan tetap, kontribusi mereka terhadap penerimaan pajak dan sistem jaminan sosial Polandia juga semakin meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengungsi tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga dapat menjadi faktor ekonomi yang berkontribusi terhadap pembangunan negara penerima apabila diberikan akses yang memadai untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi.<sup>40</sup>

Meski demikian, proses integrasi ekonomi tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Persaingan tenaga kerja, kesenjangan keterampilan, keterbatasan penguasaan bahasa Polandia, serta ketidakpastian status tinggal jangka panjang menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui kebijakan integrasi yang efektif. Selain itu, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengungsi Ukraina masih bekerja pada pekerjaan dengan tingkat keterampilan yang lebih rendah dibandingkan latar belakang pendidikan mereka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi ekonomi pengungsi belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, keberhasilan integrasi ekonomi pengungsi sangat bergantung pada kemampuan negara penerima dalam menyediakan akses pekerjaan yang inklusif, pengakuan kualifikasi profesional, pelatihan bahasa, serta kebijakan integrasi yang berkelanjutan..<sup>41</sup>

#### **2.4.2 Dampak Sosial dan Ketimpangan Perlakuan terhadap Pengungsi**

Dari aspek sosial, integrasi pengungsi Ukraina di Polandia menghadirkan dinamika yang kompleks. Pada tahap awal krisis, masyarakat Polandia menunjukkan tingkat solidaritas yang tinggi melalui berbagai bentuk bantuan kemanusiaan, seperti penyediaan tempat tinggal sementara, bantuan logistik, dan dukungan sosial bagi para pengungsi. Respons positif ini menunjukkan adanya

---

<sup>39</sup> United Nations High Commissioner for Refugees. (2024). *Resources for employers in Poland*.

<sup>40</sup> Deloitte & UNHCR. (2025). *Analysis of the impact of refugees from Ukraine on the economy of Poland*.

<sup>41</sup> Aluchna, M., Chutnik, A., Hakem Zadeh, F., & Pachocka, M. (2024). NGOs' support for migrants' integration on the labour market: Ukrainian refugees in Poland. *Academy of Management Proceedings*, 2024(1).

kesadaran kolektif terhadap pentingnya perlindungan kemanusiaan bagi korban konflik.<sup>42</sup>

Fenomena tersebut juga membawa konsekuensi sosial yang tidak dapat diabaikan. Peningkatan jumlah pengungsi dalam waktu yang relatif singkat memberikan tekanan terhadap fasilitas publik, kebutuhan perumahan, layanan kesehatan, dan pendidikan yang tersedia di negara penerima. Apabila tidak dikelola secara efektif, kondisi ini berpotensi memunculkan ketegangan antara pengungsi dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan darurat, tetapi juga pada pembangunan kohesi sosial jangka panjang.<sup>43</sup>

Selain itu, banyak pengungsi Ukraina menghadapi tantangan psikologis akibat pengalaman konflik, kehilangan anggota keluarga, dan ketidakpastian masa depan. Kondisi ini mempengaruhi proses adaptasi mereka di lingkungan baru serta meningkatkan kebutuhan terhadap layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial.<sup>44</sup>

Krisis pengungsi Ukraina juga memperlihatkan adanya ketimpangan perlakuan terhadap kelompok pengungsi berdasarkan asal kebangsaan dan latar belakang etnis. Dibandingkan dengan pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika yang datang ke Eropa pada krisis migrasi sebelumnya, pengungsi Ukraina memperoleh akses yang lebih cepat terhadap izin tinggal, pekerjaan, pendidikan, dan bantuan sosial. Perbedaan ini memunculkan perdebatan mengenai konsistensi penerapan prinsip kemanusiaan dalam kebijakan migrasi internasional.<sup>45</sup>

Fenomena diskriminasi juga dialami oleh sebagian pengungsi non-Ukraina yang melarikan diri dari wilayah konflik yang sama. Berbagai laporan menunjukkan bahwa mahasiswa internasional dan pekerja migran dari negara-negara Afrika dan Asia mengalami hambatan dalam proses evakuasi maupun penyeberangan perbatasan menuju Polandia. Situasi ini menunjukkan bahwa faktor identitas, ras, dan persepsi sosial masih mempengaruhi praktik perlindungan pengungsi di kawasan Eropa.<sup>46</sup>

Perbedaan perlakuan tersebut berdampak pada proses integrasi sosial-ekonomi pengungsi. Pengungsi yang memperoleh akses lebih cepat terhadap

---

<sup>42</sup> Agnieszka Pikulicka-Wilczewska, "Poland's Civil Society Response to Ukrainian Refugees," *Migration Policy Institute*, 2022.

<sup>43</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *The Ukrainian Refugee Crisis: Challenges and Opportunities for OECD Countries*.

<sup>44</sup> World Health Organization. (2022). *Mental Health and Forced Displacement: Refugees from Ukraine Requiring Mental Health and Psychosocial Support*.

<sup>45</sup> European Network Against Racism. (2022). *Equal Treatment of Refugees and Migrants Fleeing Ukraine*.

<sup>46</sup> Human Rights Watch. (2022). *Ukraine: Unequal Treatment for Foreign Nationals Attempting to Flee*.

pekerjaan dan layanan sosial memiliki peluang lebih besar untuk mencapai stabilitas hidup, sedangkan kelompok yang menghadapi hambatan administratif cenderung mengalami proses integrasi yang lebih lambat. Dengan demikian, krisis Ukraina menjadi refleksi penting mengenai tantangan keadilan dan kesetaraan dalam sistem perlindungan pengungsi internasional.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Sergio Carrera, Meltem Ineli-Ciger, Lina Vosyliūtė, & Leonie Brumat. (2022). *The EU's Response to the Ukraine Crisis: A New Model of Refugee Protection?*.

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN TEMPORARY PROTECTION DIRECTIVE (TPD) DAN IMPLEMENTASINYA DI POLANDIA**

### **3.1 Latar Belakang dan Konsep Temporary Protection Directive (TPD)**

Temporary Protection Directive (TPD) merupakan salah satu instrumen hukum yang dimiliki oleh Uni Eropa untuk merespons situasi kedaruratan pengungsian dalam skala besar. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan perlindungan sementara kepada kelompok pengungsi ketika sistem suaka konvensional tidak lagi mampu menangani lonjakan permohonan secara cepat dan efektif. TPD pertama kali disahkan pada tahun 2001 sebagai bagian dari upaya Uni Eropa membangun mekanisme solidaritas dalam menghadapi potensi krisis migrasi di masa depan. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini tidak langsung diaktifkan hingga akhirnya digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 2022 sebagai respons terhadap invasi Rusia ke Ukraina yang memicu gelombang pengungsian besar-besaran di kawasan Eropa.<sup>48</sup>

Aktivasi Temporary Protection Directive pada tahun 2022 menunjukkan adanya perubahan pendekatan Uni Eropa dalam mengelola krisis pengungsi. Jika sebelumnya penanganan pengungsi lebih banyak bergantung pada mekanisme individual melalui prosedur permohonan suaka, maka TPD memperkenalkan pendekatan kolektif yang berbasis keputusan politik bersama antar negara anggota. Pendekatan ini memungkinkan pemberian status perlindungan secara otomatis kepada kelompok pengungsi tertentu tanpa harus melalui proses administratif yang panjang. Dalam konteks krisis Ukraina, kebijakan ini menjadi sangat penting karena jumlah pengungsi yang sangat besar dalam waktu yang singkat tidak memungkinkan sistem suaka tradisional untuk bekerja secara optimal.<sup>49</sup>

Secara normatif, Temporary Protection Directive memberikan berbagai hak dasar kepada pengungsi yang berada di wilayah Uni Eropa, termasuk hak untuk tinggal secara legal dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, pengungsi juga diberikan akses terhadap pasar tenaga kerja, pendidikan, layanan kesehatan, serta bantuan sosial yang disediakan oleh negara anggota. Kebijakan ini juga mengatur adanya fleksibilitas mobilitas antar negara anggota Uni Eropa, sehingga pengungsi memiliki kesempatan untuk berpindah sesuai dengan kebutuhan dan peluang yang tersedia. Dengan demikian, TPD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen

---

<sup>48</sup> European Commission. (2022). *Temporary protection for people fleeing Ukraine*. Brussels: European Commission.

<sup>49</sup> Carrera, S., Ineli-Ciger, M., Vosyliūtė, L., & Brumat, L. (2022). *The EU's response to the Ukraine crisis: A new model of refugee protection?* CEPS Policy Insights.

perlindungan darurat, tetapi juga sebagai mekanisme integrasi awal bagi pengungsi ke dalam sistem sosial-ekonomi negara penerima.<sup>50</sup>

Dalam konteks krisis pengungsi Ukraina, penerapan Temporary Protection Directive menunjukkan peran Uni Eropa sebagai aktor regional yang berusaha merespons krisis kemanusiaan secara cepat dan terkoordinasi. Kebijakan ini mencerminkan adanya solidaritas antar negara anggota dalam menghadapi tekanan migrasi yang besar, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap prinsip perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, implementasi TPD juga tidak lepas dari tantangan, terutama dalam hal perbedaan kapasitas masing-masing negara anggota dalam menyediakan pelayanan bagi pengungsi. Oleh karena itu, TPD dapat dipahami tidak hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai bentuk kompromi politik dalam sistem tata kelola migrasi di kawasan Eropa.<sup>51</sup>

### **3.2 Implementasi Temporary Protection Directive (TPD) di Polandia**

Implementasi Temporary Protection Directive (TPD) di Polandia dimulai segera setelah Uni Eropa secara resmi mengaktifkan kebijakan tersebut pada Maret 2022 sebagai respons terhadap meningkatnya arus pengungsi dari Ukraina. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Ukraina, Polandia menjadi salah satu negara penerima pengungsi terbesar di kawasan Eropa. Pemerintah Polandia kemudian menyesuaikan kebijakan domestiknya dengan ketentuan TPD melalui penerapan berbagai regulasi darurat yang bertujuan untuk mempermudah proses penerimaan dan perlindungan pengungsi Ukraina. Langkah ini menunjukkan bahwa Polandia tidak hanya berperan sebagai negara transit, tetapi juga sebagai negara tujuan utama dalam krisis pengungsian akibat konflik Rusia–Ukraina.<sup>52</sup>

Salah satu bentuk implementasi TPD di Polandia terlihat melalui penyederhanaan prosedur administratif bagi pengungsi Ukraina yang memasuki wilayah negara tersebut. Pemerintah Polandia memberikan izin tinggal sementara kepada warga Ukraina tanpa melalui prosedur suaka konvensional yang umumnya memerlukan proses panjang dan kompleks. Pengungsi yang telah terdaftar juga memperoleh nomor identifikasi nasional (PESEL), yang memungkinkan mereka mengakses berbagai layanan publik secara legal. Kebijakan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah Polandia untuk mempercepat integrasi administratif

---

<sup>50</sup> Trauner, F. (2022). The EU's response to Ukrainian refugees. *Journal of European Integration*, 44(5), 1–15.

<sup>51</sup> European Commission. (2023). *Temporary protection: Operational guidelines*. Brussels: European Commission.

<sup>52</sup> European Commission. (2022). *Temporary protection for people fleeing Ukraine*. Brussels: European Commission.

pengungsi ke dalam sistem sosial dan ekonomi nasional.<sup>53</sup>

### **3.2.1 Lonjakan Arus Pengungsi Ukraina dan Kebutuhan Respons Kebijakan**

Invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 memicu salah satu gelombang pengungsian terbesar di Eropa sejak berakhirnya Perang Dunia II. Dalam waktu beberapa bulan setelah invasi, jutaan warga Ukraina meninggalkan negaranya untuk mencari perlindungan di negara-negara tetangga. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Ukraina, Polandia menjadi tujuan utama pengungsi karena kedekatan geografis, kemudahan akses melalui jalur darat, serta hubungan sosial dan historis yang telah terjalin antara kedua negara. Menurut data UNHCR, Polandia menerima jutaan kedatangan pengungsi Ukraina sepanjang tahun 2022, menjadikannya negara penerima terbesar di kawasan Eropa.<sup>54</sup>

Masuknya pengungsi dalam jumlah besar dan waktu yang relatif singkat menciptakan tekanan yang signifikan terhadap kapasitas negara dalam menyediakan perlindungan kemanusiaan. Fasilitas perbatasan, tempat penampungan sementara, sistem administrasi kependudukan, serta layanan publik menghadapi peningkatan beban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Situasi tersebut mendorong perlunya mekanisme perlindungan yang mampu memberikan kepastian hukum secara cepat tanpa harus melalui prosedur suaka konvensional yang memerlukan waktu panjang.<sup>55</sup>

Dalam konteks tersebut, aktivasi Temporary Protection Directive (TPD) oleh Uni Eropa pada Maret 2022 menjadi landasan penting bagi Polandia dalam merespons krisis pengungsi Ukraina. Kebijakan ini memungkinkan negara anggota memberikan perlindungan kolektif kepada pengungsi yang melarikan diri dari konflik tanpa melalui proses pemeriksaan suaka individual. Dengan demikian, TPD menjadi instrumen yang memungkinkan Polandia menangani arus pengungsian dalam skala besar secara lebih cepat dan terkoordinasi.

### **3.2.2 Implementasi TPD melalui Kebijakan Nasional Polandia**

Sebagai tindak lanjut dari aktivasi TPD, pemerintah Polandia mengadopsi berbagai kebijakan nasional untuk memberikan perlindungan kepada warga Ukraina yang memasuki wilayahnya. Salah satu langkah utama adalah pengesahan *Special Act on Assistance to Ukrainian Citizens in Connection with the Armed*

<sup>53</sup> Duszczek, M., & Kaczmarczyk, P. (2022). The war in Ukraine and migration to Poland. *Intereconomics*, 57(3), 164–170.

<sup>54</sup> United Nations High Commissioner for Refugees. (2024). *Ukraine refugee situation*. Geneva: UNHCR

<sup>55</sup> European Commission. (2022). *Council implementing decision (EU) 2022/382 establishing the existence of a mass influx of displaced persons from Ukraine*. Brussels: European Commission.

*Conflict on the Territory of Ukraine* pada 12 Maret 2022. Undang-undang khusus ini merupakan regulasi darurat yang diterbitkan pemerintah Polandia untuk mengatur status hukum warga Ukraina yang melarikan diri akibat konflik Rusia–Ukraina. Melalui regulasi tersebut, pengungsi Ukraina diberikan hak tinggal secara legal, akses terhadap pasar tenaga kerja, pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, serta berbagai bentuk perlindungan administratif lainnya. Kehadiran undang-undang ini menjadi instrumen utama dalam menerjemahkan ketentuan Temporary Protection Directive (TPD) ke dalam sistem hukum nasional Polandia.<sup>56</sup>

Melalui kebijakan tersebut, warga Ukraina diberikan hak tinggal sementara secara legal di Polandia dan memperoleh akses terhadap berbagai layanan yang sebelumnya hanya tersedia bagi warga negara atau penduduk tetap. Langkah ini menunjukkan bagaimana kebijakan Uni Eropa diterjemahkan ke dalam kebijakan domestik untuk menjawab kebutuhan yang muncul akibat dinamika pengungsian yang berlangsung secara cepat.

Salah satu instrumen penting dalam implementasi kebijakan tersebut adalah pemberian nomor identifikasi nasional atau PESEL (*Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności*) kepada pengungsi Ukraina. PESEL merupakan sistem nomor identitas nasional yang digunakan oleh pemerintah Polandia untuk mencatat dan mengidentifikasi penduduk secara administratif. Melalui nomor identifikasi ini, pengungsi Ukraina dapat mengakses berbagai layanan publik, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pembukaan rekening bank, serta kesempatan kerja secara legal. Sistem PESEL menjadi sarana penting dalam proses integrasi awal karena memberikan identitas hukum yang diakui oleh negara dan memudahkan pemerintah dalam menyalurkan berbagai bentuk perlindungan serta bantuan kepada pengungsi.<sup>57</sup>

### **3.2.3 Akses Pengungsi terhadap Pekerjaan, Pendidikan, dan Pelayanan Kesehatan**

Implementasi TPD di Polandia tidak hanya berfokus pada pemberian status hukum, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan sosial-ekonomi pengungsi. Dalam bidang ketenagakerjaan, pemerintah Polandia memberikan akses yang relatif mudah bagi pengungsi Ukraina untuk memasuki pasar kerja. Kebijakan ini

---

<sup>56</sup> Government of Poland. (2022). *Act of 12 March 2022 on assistance to citizens of Ukraine in connection with the armed conflict on the territory of that state*. Journal of Laws of the Republic of Poland.

<sup>57</sup> OECD. (2023). *What we know about the skills and early labour market outcomes of refugees from Ukraine*. Paris: OECD Publishing.

memungkinkan pengungsi memperoleh sumber pendapatan secara mandiri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan kemanusiaan.<sup>58</sup>

Di sektor pendidikan, pemerintah Polandia membuka akses bagi anak-anak pengungsi Ukraina untuk mengikuti pendidikan formal di sekolah nasional. Berbagai program pendukung juga dikembangkan, termasuk kelas bahasa Polandia, bantuan psikologis, serta penyediaan materi pembelajaran yang membantu proses adaptasi siswa pengungsi. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak yang terdampak konflik dan mencegah hilangnya akses pendidikan dalam jangka panjang.<sup>59</sup>

Pada bidang kesehatan, pengungsi Ukraina memperoleh akses terhadap layanan kesehatan publik yang mencakup pelayanan dasar, layanan darurat, serta dukungan kesehatan mental. Kebutuhan layanan kesehatan mental menjadi perhatian khusus mengingat banyak pengungsi mengalami trauma akibat perang, kehilangan anggota keluarga, maupun ketidakpastian mengenai masa depan mereka.<sup>60</sup>

Keberhasilan implementasi TPD di Polandia tidak hanya ditentukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh keterlibatan berbagai aktor non-negara. Organisasi internasional seperti UNHCR, IOM, UNICEF, dan WHO berperan dalam mendukung distribusi bantuan kemanusiaan, perlindungan kelompok rentan, serta penyediaan layanan sosial bagi pengungsi.

Di tingkat lokal, berbagai organisasi masyarakat sipil dan relawan turut memberikan kontribusi yang signifikan. Banyak warga Polandia menyediakan tempat tinggal sementara, bantuan logistik, layanan penerjemahan, serta pendampingan administratif bagi pengungsi yang baru tiba. Keterlibatan masyarakat sipil ini membantu memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi lonjakan pengungsi yang sangat besar pada tahap awal krisis.<sup>61</sup>

### **3.3 Tantangan Implementasi TPD di Tengah Dinamika Pengungsian**

Meskipun implementasi TPD di Polandia dinilai berhasil memberikan perlindungan awal bagi jutaan pengungsi Ukraina, berbagai tantangan tetap muncul dalam pelaksanaannya. Lonjakan jumlah pengungsi menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap perumahan, pendidikan, layanan kesehatan,

---

<sup>58</sup> Duszczek, Maciej, & Kaczmarczyk, Paweł. (2022). *The war in Ukraine and migration to Poland*. *Intereconomics*, 57(3), 164–170.

<sup>59</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *What we know about the skills and early labour market outcomes of refugees from Ukraine*. Paris: OECD Publishing.

<sup>60</sup> International Organization for Migration. (2023). *Ukraine regional response and recovery*. Geneva: IOM.

<sup>61</sup> United Nations Children's Fund. (2023). *Education response for Ukrainian refugees*. New York: UNICEF.

dan bantuan sosial. Kondisi tersebut memberikan tekanan yang besar terhadap kapasitas layanan publik, terutama di wilayah yang menerima konsentrasi pengungsi dalam jumlah tinggi.

Selain itu, dinamika pengungsian yang terus berubah juga menciptakan tantangan baru bagi pemerintah. Sebagian pengungsi memilih kembali ke Ukraina, sementara sebagian lainnya memutuskan untuk menetap lebih lama di Polandia. Situasi ini menuntut adanya penyesuaian kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penanganan darurat, tetapi juga pada integrasi jangka panjang.

Dengan demikian, implementasi TPD di Polandia menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan perlindungan pengungsi tidak hanya ditentukan oleh kerangka hukum yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam menyesuaikan kebijakan tersebut terhadap dinamika pengungsian yang terus berkembang.<sup>62</sup>

Penerapan Temporary Protection Directive (TPD) di Polandia tidak dapat dipisahkan dari dinamika pengungsian yang terus berkembang sejak awal invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Arus kedatangan pengungsi yang sangat besar dalam waktu singkat menciptakan tantangan yang berbeda dibandingkan krisis migrasi sebelumnya di Eropa. Pada tahap awal konflik, fokus utama pemerintah Polandia adalah menyediakan perlindungan darurat bagi para pengungsi yang memasuki wilayahnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kebutuhan pengungsi berubah dari sekadar perlindungan sementara menjadi kebutuhan integrasi sosial dan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Perubahan dinamika tersebut mempengaruhi cara pemerintah Polandia mengimplementasikan TPD. Kebijakan yang pada awalnya dirancang sebagai respons darurat harus disesuaikan dengan kenyataan bahwa sebagian pengungsi memilih menetap lebih lama di Polandia. Situasi ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan berbagai kebijakan lanjutan yang tidak hanya berorientasi pada penerimaan pengungsi, tetapi juga pada pengelolaan dampak jangka panjang terhadap sistem sosial, ekonomi, dan pelayanan publik nasional. Oleh karena itu, implementasi TPD di Polandia menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan pengungsi sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam menyesuaikan kebijakan terhadap perubahan dinamika pengungsian yang berlangsung secara terus-menerus.

---

<sup>62</sup> European Commission. (2023). *Temporary Protection Directive: Operational guidelines*. Brussels: European Commission.

### 3.3.1 Perubahan Pola dan Karakteristik Pengungsi Ukraina

Arus pengungsian dari Ukraina sejak dimulainya invasi Rusia pada Februari 2022 menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan berbagai krisis pengungsi yang pernah terjadi di Eropa sebelumnya. Dalam waktu singkat, jutaan warga Ukraina meninggalkan wilayah konflik dan mencari perlindungan di negara-negara tetangga, terutama Polandia. Skala perpindahan penduduk yang sangat besar ini menjadikan krisis Ukraina sebagai salah satu gelombang pengungsian terbesar di Eropa sejak berakhirnya Perang Dunia II. Tingginya jumlah pengungsi yang memasuki Polandia dalam kurun waktu yang relatif singkat menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mengelola proses penerimaan, registrasi, dan pemberian perlindungan kepada para pengungsi. Selain itu, perubahan pola migrasi yang berlangsung secara cepat menuntut adanya penyesuaian kebijakan yang mampu merespons kebutuhan pengungsi yang terus berkembang.<sup>63</sup>

Salah satu karakteristik utama pengungsi Ukraina adalah dominasi perempuan dan anak-anak dalam komposisi demografis mereka. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan mobilisasi militer yang diterapkan pemerintah Ukraina setelah invasi Rusia, yang mewajibkan sebagian besar laki-laki berusia 18 hingga 60 tahun untuk tetap berada di dalam negeri guna mendukung upaya pertahanan nasional. Akibatnya, sebagian besar individu yang melintasi perbatasan menuju Polandia terdiri atas ibu dengan anak-anak mereka, perempuan lanjut usia, serta kelompok rentan lainnya. Komposisi demografis ini menciptakan kebutuhan perlindungan yang berbeda dibandingkan dengan krisis pengungsi pada umumnya, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan reproduksi, perlindungan anak, dan layanan psikososial.<sup>64</sup>

Selain didominasi oleh perempuan dan anak-anak, banyak pengungsi Ukraina berasal dari wilayah perkotaan yang mengalami dampak langsung akibat serangan militer. Sebelum konflik berlangsung, sebagian besar dari mereka telah memiliki akses terhadap pendidikan formal, pelayanan kesehatan modern, serta kesempatan kerja yang relatif baik.<sup>65</sup> Oleh karena itu, banyak pengungsi Ukraina memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi dan pengalaman profesional di berbagai sektor pekerjaan. Karakteristik ini membedakan mereka dari beberapa kelompok pengungsi lain yang sebelumnya datang ke Eropa. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi memberikan potensi yang besar bagi proses integrasi ke pasar

---

<sup>63</sup> United Nations High Commissioner for Refugees. (2024). *Ukraine Refugee Situation*.

<sup>64</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *What are the integration challenges of Ukrainian refugee women?*

<sup>65</sup> International Organization for Migration. (2023). *Ukraine Response Situation Report*.

tenaga kerja di negara penerima, termasuk Polandia. Namun demikian, potensi tersebut tidak selalu dapat dimanfaatkan secara optimal karena adanya berbagai hambatan struktural yang dihadapi selama proses adaptasi.<sup>66</sup>

Dalam perkembangannya, pola pengungsian Ukraina juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada tahap awal konflik, sebagian besar pengungsi memandang perpindahan mereka sebagai langkah sementara hingga situasi keamanan di Ukraina membaik. Banyak dari mereka berharap dapat kembali ke negara asal dalam waktu singkat setelah konflik mereda. Akan tetapi, berlanjutnya perang dan ketidakpastian kondisi keamanan menyebabkan sebagian pengungsi mulai mempertimbangkan untuk tinggal lebih lama di negara penerima. Perubahan persepsi ini berdampak pada kebutuhan mereka terhadap pekerjaan yang stabil, akses pendidikan jangka panjang bagi anak-anak, serta kepastian hukum terkait status tinggal di Polandia dan negara-negara Uni Eropa lainnya.<sup>67</sup>

Perubahan pola pengungsian juga terlihat dari meningkatnya mobilitas sekunder (*secondary movement*) di antara para pengungsi Ukraina. Setelah memasuki Polandia sebagai negara tujuan awal, sebagian pengungsi memilih melanjutkan perjalanan ke negara-negara Eropa lainnya seperti Germany, France, Netherlands, dan Spain untuk mencari peluang ekonomi, pendidikan, atau dukungan keluarga yang lebih baik. Mobilitas ini menunjukkan bahwa Polandia tidak hanya berfungsi sebagai negara tujuan, tetapi juga sebagai titik transit bagi sebagian pengungsi. Kondisi tersebut mempengaruhi perencanaan kebijakan pemerintah karena jumlah pengungsi yang berada di wilayah Polandia terus berubah sesuai perkembangan situasi konflik dan kondisi ekonomi di negara-negara tujuan lainnya.<sup>68</sup>

Di samping karakteristik sosial dan demografis, kondisi psikologis pengungsi Ukraina juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Banyak pengungsi mengalami trauma akibat kehilangan anggota keluarga, kerusakan tempat tinggal, pengalaman menyaksikan kekerasan, serta ketidakpastian mengenai masa depan mereka. Anak-anak menjadi salah satu kelompok yang paling rentan karena konflik berdampak langsung terhadap perkembangan psikologis dan pendidikan mereka. Oleh karena itu, kebutuhan akan dukungan kesehatan mental dan layanan psikososial menjadi bagian penting dalam kebijakan perlindungan pengungsi yang diterapkan oleh Polandia. Berbagai organisasi internasional dan lembaga kemanusiaan juga menempatkan layanan kesehatan

---

<sup>66</sup> Council of the European Union. (2025). *EU member states agree to extend temporary protection for refugees from Ukraine*.

<sup>67</sup> European Migration Network, & Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Labour market integration of beneficiaries of temporary protection from Ukraine*. European Commission.

<sup>68</sup> European Commission. (2024). *Fleeing Ukraine: Your rights in the EU*.

mental sebagai salah satu prioritas utama dalam penanganan krisis pengungsi Ukraina.<sup>69</sup>

Karakteristik dan perubahan pola pengungsian tersebut menunjukkan bahwa krisis pengungsi Ukraina tidak hanya berkaitan dengan perpindahan fisik lintas negara, tetapi juga menyangkut proses adaptasi sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks. Dinamika ini menuntut adanya kebijakan yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pengungsi yang terus berkembang. Dalam konteks implementasi Temporary Protection Directive (TPD), pemahaman terhadap karakteristik pengungsi menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas kebijakan perlindungan yang diberikan oleh Polandia. Dengan demikian, perubahan pola dan karakteristik pengungsi Ukraina tidak hanya mempengaruhi strategi perlindungan jangka pendek, tetapi juga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan integrasi yang lebih berkelanjutan di masa mendatang.<sup>70</sup>

### **3.3.2 Tantangan Sosial dan Ketimpangan Perlakuan dalam Implementasi TPD**

Meskipun implementasi Temporary Protection Directive (TPD) di Polandia sering dipandang sebagai salah satu respons kemanusiaan paling cepat terhadap krisis pengungsi Ukraina, kebijakan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kritik. Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian adalah munculnya ketimpangan perlakuan terhadap kelompok pengungsi berdasarkan kewarganegaraan dan latar belakang etnis. Aktivasi TPD memberikan perlindungan secara otomatis kepada warga negara Ukraina dan kelompok tertentu yang tinggal di Ukraina sebelum konflik berlangsung. Akan tetapi, perlindungan yang sama tidak selalu diberikan kepada warga negara ketiga (third-country nationals), seperti mahasiswa internasional, pekerja migran, maupun pencari suaka dari negara lain yang juga melarikan diri dari wilayah konflik Ukraina.<sup>71</sup>

Sejumlah organisasi hak asasi manusia melaporkan adanya praktik diskriminasi di beberapa titik perbatasan Polandia-Ukraina pada tahap awal krisis. Kelompok non-Ukraina dilaporkan mengalami waktu tunggu yang lebih lama, prioritas evakuasi yang lebih rendah, serta hambatan administratif dibandingkan warga negara Ukraina. Kondisi tersebut memunculkan kritik bahwa respons kemanusiaan Uni Eropa dan Polandia belum sepenuhnya menerapkan prinsip non-

---

<sup>69</sup> European Commission. (2024). *Fleeing Ukraine: Healthcare*.

<sup>70</sup> Council of the European Union. (2026). *How the EU helps refugees from Ukraine*.

<sup>71</sup> Amnesty International. (2022). *Ukraine: Unequal treatment of foreign nationals attempting to flee Ukraine*. London: Amnesty International.

discrimination sebagaimana diatur dalam hukum internasional mengenai perlindungan pengungsi dan hak asasi manusia.<sup>72</sup>

Selain isu diskriminasi, kritik juga diarahkan pada karakter TPD yang bersifat sementara. Perlindungan yang diberikan melalui kebijakan ini pada dasarnya dirancang sebagai mekanisme darurat untuk menghadapi arus pengungsi dalam jangka waktu terbatas. Seiring berlanjutnya konflik Rusia-Ukraina, muncul pertanyaan mengenai masa depan para pengungsi setelah masa perlindungan sementara berakhir. Ketidakpastian mengenai status hukum jangka panjang dapat mempengaruhi keputusan pengungsi terkait pekerjaan, pendidikan, investasi ekonomi, maupun proses integrasi sosial di negara penerima.<sup>73</sup>

Tantangan lain berkaitan dengan perbedaan kapasitas antarnegara anggota Uni Eropa dalam melaksanakan TPD. Meskipun Polandia menerima dukungan dari Uni Eropa dan organisasi internasional, sebagian besar beban perlindungan tetap ditanggung oleh negara-negara yang berbatasan langsung dengan Ukraina. Situasi ini menunjukkan bahwa mekanisme solidaritas dalam TPD belum sepenuhnya mampu mendistribusikan tanggung jawab secara merata di antara negara anggota Uni Eropa.<sup>74</sup>

Dari perspektif kebijakan publik, implementasi TPD juga memperlihatkan adanya pengaruh faktor politik dan identitas dalam proses penerimaan pengungsi. Respons yang relatif terbuka terhadap pengungsi Ukraina sering dibandingkan dengan respons Uni Eropa terhadap krisis pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika pada tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan perlakuan tersebut memunculkan perdebatan mengenai konsistensi penerapan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan pengungsi di kawasan Eropa. Beberapa akademisi berpendapat bahwa faktor kedekatan geografis, budaya, agama, dan identitas Eropa turut mempengaruhi tingkat penerimaan terhadap pengungsi Ukraina.

Meskipun demikian, berbagai kritik tersebut tidak menghilangkan fakta bahwa TPD berhasil memberikan perlindungan cepat kepada jutaan pengungsi Ukraina. Kritik yang muncul justru menunjukkan perlunya evaluasi terhadap mekanisme perlindungan Uni Eropa agar mampu menjamin perlakuan yang lebih setara, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh kelompok pengungsi tanpa memandang asal kebangsaan maupun latar belakang etnis mereka.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> Human Rights Watch. (2022). *Ukraine: Unequal treatment for foreign nationals fleeing war*. New York: Human Rights Watch.

<sup>73</sup> European Union Agency for Fundamental Rights. (2023). *Fleeing Ukraine: Experiences of displaced people in the EU*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

<sup>74</sup> Benton, M., & Banulescu-Bogdan, N. (2023). *The Ukraine crisis highlights strengths and limits of temporary protection*. Washington, DC: Migration Policy Institute.

<sup>75</sup> United Nations High Commissioner for Refugees. (2023). *Regional refugee response plan for the Ukraine situation*. Geneva: UNHCR.

### **3.3.3 Tantangan Ekonomi dalam Implementasi Temporary Protection Directive (TPD)**

Selain menghadapi tantangan sosial dan isu ketimpangan perlakuan, implementasi Temporary Protection Directive (TPD) di Polandia juga dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi. Meskipun kebijakan ini berhasil memberikan akses cepat terhadap perlindungan dan pasar tenaga kerja bagi pengungsi Ukraina, keberadaan jutaan pengungsi dalam waktu yang relatif singkat menimbulkan tekanan yang cukup besar terhadap kapasitas ekonomi negara penerima. Pemerintah Polandia harus mengalokasikan anggaran tambahan untuk menyediakan bantuan sosial, perumahan sementara, layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai program integrasi bagi pengungsi yang terus berdatangan sejak awal konflik pada tahun 2022.<sup>76</sup>

Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya beban fiskal yang harus ditanggung pemerintah. Sejak diberlakukannya TPD, Polandia menyediakan berbagai bentuk bantuan bagi pengungsi Ukraina, termasuk bantuan tunai, akses layanan kesehatan gratis, pendidikan bagi anak-anak pengungsi, serta dukungan tempat tinggal sementara. Kebijakan tersebut membutuhkan pendanaan yang besar dan berkelanjutan, terutama ketika konflik Rusia-Ukraina berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Dalam kondisi tersebut, pemerintah harus menyeimbangkan kebutuhan pengungsi dengan kebutuhan masyarakat lokal agar tidak menimbulkan ketidakpuasan sosial maupun tekanan terhadap anggaran negara.

Tantangan ekonomi lainnya berkaitan dengan sektor perumahan. Meningkatnya jumlah pengungsi menyebabkan permintaan terhadap tempat tinggal meningkat secara signifikan, terutama di kota-kota besar seperti Warsawa, Kraków, dan Wrocław. Kenaikan permintaan tersebut berdampak pada meningkatnya harga sewa properti dan keterbatasan ketersediaan hunian yang terjangkau. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi pengungsi, tetapi juga masyarakat lokal yang harus bersaing dalam memperoleh akses terhadap perumahan dengan biaya yang semakin tinggi.

Di bidang ketenagakerjaan, TPD memang memberikan akses yang relatif mudah bagi pengungsi Ukraina untuk bekerja secara legal. Akan tetapi, proses integrasi ekonomi tidak selalu berjalan secara optimal. Banyak pengungsi yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan keterampilan profesional tidak dapat

---

<sup>76</sup> Eurostat. (2024). *Beneficiaries of temporary protection at the end of December 2023*. Luxembourg: European Commission.

langsung bekerja sesuai dengan kompetensinya karena hambatan bahasa, perbedaan standar sertifikasi profesi, serta keterbatasan pengakuan ijazah. Akibatnya, sebagian pengungsi bekerja pada sektor dengan produktivitas dan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan kemampuan yang mereka miliki.

Komposisi demografis pengungsi Ukraina yang didominasi oleh perempuan dan anak-anak juga menciptakan tantangan tersendiri dalam integrasi ekonomi. Banyak perempuan pengungsi menghadapi kesulitan untuk memasuki pasar kerja secara penuh karena tanggung jawab pengasuhan anak dan keterbatasan akses terhadap fasilitas penitipan anak. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat partisipasi ekonomi sebagian kelompok pengungsi masih berada di bawah potensi yang sebenarnya dapat mereka capai.

Selain itu, implementasi TPD juga memunculkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap pasar tenaga kerja domestik. Meskipun sebagian penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja Ukraina membantu mengatasi kekurangan pekerja di beberapa sektor ekonomi Polandia, terdapat kekhawatiran bahwa peningkatan jumlah pekerja dapat menciptakan persaingan pada sektor-sektor tertentu, khususnya pekerjaan dengan keterampilan rendah. Oleh karena itu, pemerintah Polandia perlu memastikan bahwa proses integrasi tenaga kerja pengungsi dilakukan secara terencana agar mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa menimbulkan ketegangan di pasar kerja domestik.

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi TPD tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memberikan perlindungan hukum kepada pengungsi, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam mengelola konsekuensi ekonomi yang muncul akibat arus pengungsian berskala besar. Dengan demikian, kebijakan perlindungan sementara perlu diimbangi dengan strategi integrasi ekonomi jangka panjang agar keberadaan pengungsi dapat memberikan manfaat bagi pengungsi maupun negara penerima secara berkelanjutan.

## **BAB IV**

### **ANALISA KEBIJAKAN TPD TERHADAP KEAMANAN SOSIAL-EKONOMI PENGUNGSI DI POLANDIA**

#### **4.1 Dampak Temporary Protection Directive (TPD) terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi Pengungsi Ukraina di Polandia**

Dalam perspektif *Human Security*, keamanan tidak hanya dipahami sebagai perlindungan negara dari ancaman eksternal, tetapi juga sebagai perlindungan individu dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup dan kesejahteraan mereka. Menurut *Human Development Report* yang diterbitkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1994, konsep *Human Security* terdiri atas tujuh dimensi, yaitu *economic security*, *food security*, *health security*, *environmental security*, *personal security*, *community security*, dan *political security*. Ketujuh dimensi tersebut saling berkaitan dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar manusia serta memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk ancaman yang dihadapi individu.<sup>77</sup>

Namun, penelitian ini tidak menggunakan seluruh dimensi *Human Security* dalam proses analisis. Penelitian ini hanya memfokuskan pada empat dimensi, yaitu *economic security*, *personal security*, *health security*, dan *community security*. Pemilihan keempat dimensi tersebut didasarkan pada relevansinya dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis implementasi *Temporary Protection Directive* (TPD) terhadap perlindungan serta kondisi sosial-ekonomi pengungsi Ukraina di Polandia. Keempat dimensi tersebut secara langsung berkaitan dengan hak-hak yang diberikan melalui implementasi TPD, seperti akses terhadap pekerjaan, perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta proses integrasi sosial. Sementara itu, dimensi *food security*, *environmental security*, dan *political security* tidak dijadikan fokus penelitian karena tidak memiliki keterkaitan langsung dengan rumusan masalah maupun indikator implementasi TPD yang dianalisis dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penggunaan empat dimensi *Human Security* dinilai telah memadai untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian secara lebih terarah.

Kebijakan *Temporary Protection Directive* (TPD) memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial-ekonomi pengungsi Ukraina di Polandia. Melalui kebijakan tersebut, pengungsi memperoleh akses yang lebih cepat terhadap pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta berbagai bentuk bantuan sosial.

---

<sup>77</sup> United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security* (New York: Oxford University Press, 1994), 22–25.

Akses tersebut berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi sekaligus meningkatkan rasa aman selama mereka berada di negara penerima. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dianalisis bagaimana implementasi TPD berkontribusi terhadap pemenuhan empat dimensi *Human Security* yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *economic security*, *personal security*, *health security*, dan *community security*, sebagai dasar untuk menilai dampak kebijakan terhadap kondisi sosial-ekonomi pengungsi Ukraina di Polandia.

#### **4.1.1 Analisis Kebijakan TPD terhadap Economic Security Pengungsi Ukraina**

Dalam perspektif Human Security yang dikemukakan oleh United Nations Development Programme (UNDP), *economic security* merupakan kondisi ketika individu memiliki akses terhadap sumber pendapatan yang memadai, kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak, serta perlindungan dari kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi. Keamanan ekonomi menjadi salah satu dari tujuh dimensi Human Security karena kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan prasyarat bagi terciptanya keamanan manusia secara menyeluruh. Bagi pengungsi, hilangnya pekerjaan, tempat tinggal, dan sumber penghasilan akibat konflik bersenjata menjadikan pemenuhan keamanan ekonomi sebagai kebutuhan yang sangat mendesak.<sup>78</sup>

Dalam konteks pengungsi Ukraina di Polandia, implementasi Temporary Protection Directive (TPD) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan *economic security*. Melalui kebijakan tersebut, pengungsi memperoleh hak untuk bekerja secara legal tanpa harus menunggu penyelesaian prosedur suaka yang biasanya memerlukan waktu yang lama. Akses terhadap pasar tenaga kerja memungkinkan para pengungsi memperoleh pendapatan secara mandiri sehingga ketergantungan terhadap bantuan kemanusiaan dapat dikurangi. Dari sudut pandang Human Security, kondisi tersebut menunjukkan bahwa TPD tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menciptakan rasa aman melalui peningkatan kemampuan ekonomi para pengungsi.<sup>79</sup>

Efektivitas kebijakan tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi pengungsi Ukraina di pasar tenaga kerja Polandia. Berdasarkan laporan OECD International Migration Outlook 2023, sekitar 65% pengungsi Ukraina usia produktif di Polandia telah bekerja pada akhir tahun 2022, menjadikan Polandia sebagai negara dengan tingkat penyerapan tenaga kerja pengungsi Ukraina

---

<sup>78</sup> United Nations Development Programme. (1994). *Human Development Report 1994*. Oxford University Press, hlm. 24–33.

<sup>79</sup> European Commission. (2022). *Communication on Temporary Protection for People Fleeing Russia's War against Ukraine*, hlm. 2–6.

tertinggi di antara negara-negara anggota OECD yang menerima pengungsi dalam jumlah besar. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain seperti Inggris (61%), Swedia (56%), dan Lithuania (53%). Keberhasilan ini tidak terlepas dari kebijakan Polandia yang memberikan hak bekerja sejak awal kedatangan pengungsi melalui implementasi TPD.<sup>80</sup>

Selain meningkatkan keamanan ekonomi bagi pengungsi, keberadaan tenaga kerja Ukraina juga memberikan manfaat bagi perekonomian Polandia. Sebelum pecahnya konflik, Polandia telah menghadapi kekurangan tenaga kerja akibat rendahnya angka kelahiran, migrasi tenaga kerja ke negara-negara Eropa Barat, dan proses penuaan penduduk. Masuknya ratusan ribu pengungsi usia produktif membantu mengisi kebutuhan tenaga kerja di sektor manufaktur, perdagangan, logistik, jasa, konstruksi, dan pelayanan domestik. OECD Economic Survey: Poland 2023 mencatat bahwa sekitar 60% pengungsi dewasa telah memperoleh pekerjaan, sehingga membantu mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi tekanan kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor.<sup>81</sup>

Meskipun demikian, tingginya tingkat partisipasi kerja belum sepenuhnya mencerminkan tercapainya *economic security* secara optimal. Laporan OECD menunjukkan bahwa sebagian besar pengungsi Ukraina bekerja pada sektor yang memiliki hambatan masuk rendah (*low-entry barrier jobs*), sehingga banyak yang mengalami skills mismatch, yaitu bekerja di bawah tingkat pendidikan dan kompetensi yang dimiliki. Sebagian besar pengungsi juga merupakan perempuan yang datang bersama anak-anak karena laki-laki usia produktif tetap berada di Ukraina akibat kebijakan wajib militer. Kondisi tersebut menyebabkan banyak perempuan mengalami kesulitan bekerja penuh waktu karena harus menjalankan tanggung jawab pengasuhan anak. Hambatan bahasa, pengakuan ijazah, dan sertifikasi profesi juga membatasi kesempatan mereka memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi.<sup>82</sup>

Perkembangan yang lebih mutakhir menunjukkan bahwa proses integrasi ekonomi pengungsi Ukraina terus mengalami peningkatan. OECD (2025) melaporkan bahwa tingkat pekerjaan pengungsi Ukraina di Polandia meningkat menjadi sekitar 78% pada tahun 2024, tertinggi di antara seluruh negara OECD penerima pengungsi Ukraina. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan sementara yang memberikan akses cepat terhadap pekerjaan

---

<sup>80</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *International Migration Outlook 2023*, hlm. 67–71.

<sup>81</sup> OECD. (2023). *OECD Economic Surveys: Poland 2023*, hlm. 49–55.

<sup>82</sup> OECD. (2023). *What We Know About the Skills and Early Labour Market Outcomes of Refugees from Ukraine*, hlm. 8–17.

mampu mempercepat integrasi ekonomi dibandingkan mekanisme suaka konvensional. Walaupun demikian, OECD tetap menekankan bahwa peningkatan kualitas pekerjaan, pengakuan kualifikasi profesional, dan penguatan pelatihan bahasa masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan keamanan ekonomi yang berkelanjutan bagi para pengungsi.<sup>83</sup>

Berdasarkan analisis tersebut, implementasi TPD dapat dinilai telah berhasil meningkatkan dimensi *economic security* dalam kerangka Human Security. Kebijakan ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada pengungsi Ukraina, tetapi juga membuka akses terhadap pekerjaan yang memungkinkan mereka memperoleh pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Namun demikian, keamanan ekonomi yang bersifat berkelanjutan belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat berbagai hambatan struktural, seperti ketidaksesuaian pekerjaan dengan kompetensi, keterbatasan bahasa, pengakuan kualifikasi profesional, dan beban pengasuhan yang terutama dialami oleh pengungsi perempuan. Oleh karena itu, keberhasilan TPD dalam dimensi *economic security* perlu diikuti dengan kebijakan integrasi jangka panjang agar pengungsi tidak hanya memperoleh pekerjaan, tetapi juga kesempatan untuk berkembang secara ekonomi sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.

#### **4.1.2 Analisis Kebijakan TPD terhadap Health Security Pengungsi Ukraina**

Menurut UNDP (1994), *health security* merupakan kondisi ketika individu memperoleh perlindungan dari penyakit, memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, serta memperoleh lingkungan yang mendukung kesehatan fisik maupun mental. Dalam situasi konflik bersenjata, dimensi ini menjadi sangat penting karena pengungsi umumnya menghadapi berbagai risiko kesehatan akibat perjalanan panjang, keterbatasan fasilitas medis, serta trauma psikologis yang dialami selama konflik berlangsung.<sup>84</sup>

Melalui implementasi TPD, pemerintah Polandia memberikan hak kepada pengungsi Ukraina untuk mengakses sistem pelayanan kesehatan publik dengan ketentuan yang hampir setara dengan warga negara Polandia. Pengungsi memperoleh pelayanan kesehatan primer, pelayanan rumah sakit, vaksinasi, pelayanan ibu dan anak, serta layanan kesehatan mental yang dibiayai melalui sistem kesehatan nasional Polandia. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan

---

<sup>83</sup> OECD. (2025). *Ukraine's Strategic Response to the Displacement Crisis*, hlm. 84–90.

<sup>84</sup> UNDP. (1994). *Human Development Report 1994*, hlm. 30–33.

bahwa pengungsi tetap memperoleh pelayanan kesehatan dasar tanpa harus menghadapi hambatan administratif yang rumit.<sup>85</sup>

Aspek kesehatan mental juga menjadi perhatian penting dalam implementasi kebijakan ini. Sebagian besar pengungsi Ukraina merupakan perempuan dan anak-anak yang mengalami trauma akibat perang, kehilangan anggota keluarga, serta ketidakpastian mengenai masa depan mereka. Oleh karena itu, berbagai organisasi internasional seperti WHO, UNICEF, dan UNHCR bekerja sama dengan pemerintah Polandia untuk menyediakan layanan konseling psikologis, rehabilitasi trauma, serta dukungan psikososial bagi kelompok rentan.<sup>86</sup>

Meskipun demikian, meningkatnya jumlah pengungsi menyebabkan sistem kesehatan Polandia menghadapi tekanan yang cukup besar. Banyak rumah sakit mengalami peningkatan jumlah pasien sehingga waktu tunggu pelayanan menjadi lebih panjang. Di beberapa wilayah juga terjadi keterbatasan tenaga kesehatan, khususnya tenaga psikolog dan psikiater yang memiliki kemampuan berbahasa Ukraina. Hambatan komunikasi tersebut mempengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengungsi.

Apabila dianalisis menggunakan pendekatan Human Security, implementasi TPD telah berhasil meningkatkan dimensi *health security* karena memberikan perlindungan terhadap risiko kesehatan melalui penyediaan akses pelayanan medis dan kesehatan mental. Walaupun demikian, keberhasilan tersebut masih bergantung pada kapasitas sistem kesehatan nasional dalam menghadapi peningkatan jumlah penerima layanan secara berkelanjutan.

#### **4.1.3 Analisis Kebijakan TPD terhadap Personal Security Pengungsi Ukraina**

Dalam konsep Human Security, *personal security* mengacu pada perlindungan individu dari ancaman kekerasan fisik, konflik bersenjata, eksploitasi, perdagangan manusia, maupun berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dimensi ini menjadi salah satu aspek paling mendasar bagi pengungsi karena mereka meninggalkan negara asal akibat ancaman terhadap keselamatan jiwa.<sup>87</sup>

Penerapan TPD memberikan perlindungan hukum kepada pengungsi Ukraina melalui pemberian status tinggal sementara yang sah. Dengan status tersebut, pengungsi memperoleh kepastian hukum untuk tinggal di Polandia tanpa khawatir dipulangkan secara paksa selama konflik berlangsung. Perlindungan

---

<sup>85</sup> World Health Organization. (2023). *Health and Migration Programme: Ukraine Emergency Response*, hlm. 10–18.

<sup>86</sup> United Nations Children's Fund. (2023). *Ukraine Refugee Response in Poland*, hlm. 18–25.

<sup>87</sup> UNDP. (1994). *Human Development Report 1994*, hlm. 30.

hukum ini juga mengurangi risiko eksploitasi tenaga kerja, penahanan administratif, maupun deportasi yang sering dialami pengungsi dengan status tidak jelas.<sup>88</sup>

Selain perlindungan hukum, pemerintah Polandia bersama berbagai organisasi internasional juga meningkatkan mekanisme perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan terhadap perdagangan manusia (*human trafficking*). Berbagai pusat penerimaan pengungsi menyediakan layanan informasi, bantuan hukum, serta mekanisme pelaporan apabila terjadi tindak eksploitasi.<sup>89</sup>

Meskipun demikian, berbagai tantangan tetap muncul. Sejumlah laporan dari organisasi hak asasi manusia menunjukkan bahwa masih terdapat kasus diskriminasi terhadap warga negara non-Ukraina yang melarikan diri dari wilayah konflik Ukraina. Selain itu, meningkatnya risiko perdagangan manusia terhadap perempuan dan anak-anak menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan melalui TPD belum sepenuhnya menghilangkan ancaman terhadap keamanan personal pengungsi.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif Human Security, implementasi TPD telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan *personal security* melalui penyediaan perlindungan hukum dan keamanan fisik. Akan tetapi, efektivitasnya masih memerlukan pengawasan yang lebih kuat terhadap praktik diskriminasi dan eksploitasi terhadap kelompok rentan.

#### **4.1.4 Analisis Kebijakan TPD terhadap Community Security Pengungsi Ukraina**

Menurut UNDP (1994), *community security* berkaitan dengan kemampuan individu mempertahankan identitas sosial, budaya, serta hubungan yang harmonis dengan komunitas tempat mereka tinggal. Dalam konteks pengungsi, keamanan komunitas mencerminkan sejauh mana mereka mampu diterima oleh masyarakat lokal tanpa mengalami diskriminasi maupun konflik sosial.<sup>90</sup>

Implementasi TPD di Polandia mendorong proses integrasi sosial melalui pemberian akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, serta berbagai program integrasi masyarakat. Pada tahap awal krisis, masyarakat Polandia menunjukkan solidaritas yang sangat tinggi melalui penyediaan tempat tinggal sementara, bantuan logistik, serta dukungan sosial bagi jutaan pengungsi Ukraina. Solidaritas tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan masyarakat

---

<sup>88</sup> European Commission. (2022). *Operational Guidelines for the Implementation of Council Implementing Decision 2022/382*, hlm. 5–11.

<sup>89</sup> International Organization for Migration. (2023). *Ukraine Response Overview*, hlm. 32–40.

<sup>90</sup> UNDP. (1994). *Human Development Report 1994*, hlm. 32–33.

menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan sementara.<sup>91</sup>

Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai tantangan baru. Meningkatnya jumlah pengungsi menyebabkan sebagian masyarakat mulai mengkhawatirkan persaingan kerja, kenaikan harga sewa rumah, serta meningkatnya tekanan terhadap pelayanan publik. Di beberapa wilayah juga muncul sentimen negatif terhadap keberadaan pengungsi akibat meningkatnya beban fiskal pemerintah daerah.<sup>92</sup>

Selain itu, beberapa organisasi hak asasi manusia juga mengkritik adanya perlakuan yang berbeda antara pengungsi Ukraina dengan pengungsi dari Timur Tengah maupun Afrika. Perbedaan tersebut memunculkan perdebatan mengenai konsistensi penerapan prinsip non-diskriminasi dalam sistem perlindungan pengungsi Uni Eropa. Dari perspektif Human Security, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keamanan komunitas tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat lokal, tetapi juga oleh adanya perlakuan yang setara terhadap seluruh kelompok pengungsi tanpa membedakan asal kebangsaan maupun identitas etnis mereka.

Berdasarkan analisis tersebut, implementasi TPD dapat dinilai berhasil memperkuat *community security* melalui peningkatan integrasi sosial dan penerimaan masyarakat terhadap pengungsi Ukraina. Akan tetapi, keberhasilan tersebut masih menghadapi tantangan berupa potensi ketegangan sosial dan munculnya praktik diskriminasi yang perlu diantisipasi melalui kebijakan integrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

#### **4.2 Analisis Efektivitas Temporary Protection Directive (TPD) dalam Menjamin Keamanan Sosial-Ekonomi Pengungsi Ukraina**

*Temporary Protection Directive* (TPD) dapat dipandang sebagai salah satu kebijakan paling responsif yang pernah diterapkan Uni Eropa dalam menangani krisis pengungsi dalam skala besar. Aktivasi kebijakan ini memungkinkan negara-negara anggota Uni Eropa, termasuk Polandia, untuk memberikan perlindungan secara cepat tanpa melalui prosedur suaka yang panjang dan kompleks. Dalam konteks krisis Ukraina, *Temporary Protection Directive* (TPD) terbukti mampu mempercepat akses pengungsi terhadap perlindungan hukum, pekerjaan,

---

<sup>91</sup> United Nations High Commissioner for Refugees. (2023). *Poland Operational Update*, hlm. 5–13.

<sup>92</sup> European Union Agency for Fundamental Rights. (2023). *Fleeing Ukraine: Experiences of Displaced Persons in the EU*, hlm. 36–47.

pendidikan, serta layanan sosial dasar. Oleh karena itu, kebijakan ini dinilai cukup efektif dalam menjawab kebutuhan darurat pengungsi pada tahap awal krisis.<sup>93</sup>

Efektivitas TPD juga terlihat dari keberhasilannya mengurangi beban administratif dalam sistem suaka Uni Eropa. Dengan mekanisme perlindungan kolektif, jutaan pengungsi Ukraina dapat memperoleh status legal dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini berbeda dengan prosedur suaka konvensional yang umumnya membutuhkan proses verifikasi panjang dan seringkali menimbulkan penumpukan permohonan. Melalui *Temporary Protection Directive* (TPD), pengungsi memperoleh kepastian hukum yang membantu mereka beradaptasi lebih cepat di negara penerima.<sup>94</sup>

Jika dianalisis melalui pendekatan Human Security, efektivitas *Temporary Protection Directive* (TPD) dapat diukur dari kemampuannya dalam mengurangi berbagai bentuk kerentanan yang dihadapi pengungsi Ukraina. Kebijakan ini terbukti mampu memberikan perlindungan awal yang cepat melalui legalitas tinggal, akses pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Akses terhadap berbagai layanan tersebut menunjukkan bahwa *Temporary Protection Directive* (TPD) berhasil memenuhi sebagian besar kebutuhan dasar yang menjadi fondasi keamanan manusia. Dengan kata lain, kebijakan ini berkontribusi dalam menciptakan rasa aman dan meningkatkan kapasitas pengungsi untuk mempertahankan keberlangsungan hidup mereka di negara penerima.

Keberhasilan tersebut juga diiringi oleh berbagai tantangan implementasi yang muncul di tingkat nasional. Di Polandia, meningkatnya jumlah pengungsi menyebabkan tekanan besar terhadap sektor perumahan, kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan *Temporary Protection Directive* (TPD) tidak hanya bergantung pada kerangka hukum Uni Eropa, tetapi juga pada kapasitas masing-masing negara dalam melaksanakan kebijakan tersebut secara efektif.<sup>95</sup>

Selain itu, efektivitas TPD juga perlu dianalisis dari perspektif keamanan sosial-ekonomi pengungsi. Meskipun pengungsi memperoleh akses terhadap pekerjaan dan layanan sosial, tidak semua mampu mencapai stabilitas ekonomi secara cepat. Banyak pengungsi masih menghadapi pekerjaan informal, keterbatasan pendapatan, serta kesulitan integrasi sosial akibat hambatan bahasa dan trauma konflik. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum saja

---

<sup>93</sup> Amnesty International. (2023). *Poland: Challenges in refugee protection and equal treatment*. London: Amnesty International.

<sup>94</sup> Human Rights Watch. (2023). *"We felt abandoned": Non-Ukrainian refugees and unequal treatment at European borders*. New York: Human Rights Watch.

<sup>95</sup> European Stability Initiative. (2023). *Europe's refugee policy after Ukraine: Lessons and contradictions*. Berlin: ESI.

belum cukup untuk menjamin keamanan sosial-ekonomi pengungsi secara menyeluruh.<sup>96</sup>

Kebijakan *Temporary Protection Directive* (TPD) juga memunculkan kritik terkait adanya perbedaan perlakuan terhadap pengungsi Ukraina dibandingkan pengungsi dari kawasan lain. Respons Uni Eropa yang lebih terbuka terhadap pengungsi Ukraina dinilai menunjukkan adanya pengaruh faktor politik, budaya, dan identitas dalam kebijakan perlindungan pengungsi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan prinsip kemanusiaan dan non-diskriminasi dalam sistem perlindungan Uni Eropa.<sup>97</sup>

Meskipun demikian, dari perspektif Human Security, efektivitas *Temporary Protection Directive* (TPD) masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Keamanan ekonomi pengungsi belum sepenuhnya terjamin karena sebagian pengungsi masih menghadapi pekerjaan berupah rendah dan kesulitan memperoleh pekerjaan sesuai kualifikasi. Di sisi lain, keamanan sosial juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas layanan publik, risiko marginalisasi sosial, serta munculnya ketegangan sosial akibat meningkatnya tekanan terhadap sumber daya publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan melalui TPD belum secara otomatis menghasilkan keamanan manusia yang menyeluruh, sehingga diperlukan kebijakan integrasi jangka panjang untuk memperkuat keberlanjutan perlindungan bagi pengungsi Ukraina.

Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, *Temporary Protection Directive* (TPD) tetap menunjukkan bahwa Uni Eropa memiliki kapasitas untuk membangun mekanisme perlindungan kolektif yang cepat dan terkoordinasi ketika terdapat kemauan politik yang kuat. Dalam jangka panjang, tantangan utama kebijakan ini terletak pada bagaimana negara-negara penerima, termasuk Polandia, mampu mengubah perlindungan sementara menjadi strategi integrasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, efektivitas TPD tidak hanya diukur dari keberhasilan respons darurat, tetapi juga dari kemampuannya menjamin keamanan sosial-ekonomi pengungsi dalam jangka panjang.

Setelah mengkaji dampak implementasi *Temporary Protection Directive* (TPD) terhadap kondisi sosial-ekonomi pengungsi Ukraina melalui perspektif *human security* pada sub bab sebelumnya, pembahasan selanjutnya diarahkan pada analisis mengenai efektivitas kebijakan tersebut. Analisis efektivitas diperlukan untuk menilai sejauh mana tujuan utama *Temporary Protection*

---

<sup>96</sup> Trauner, Florian. (2023). The temporary protection directive and the future of EU asylum policy. *Journal of European Public Policy*, 30(7), 1205–1221.

<sup>97</sup> Council of Europe. (2023). *Protecting displaced persons from Ukraine: Long-term policy challenges for Europe*. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

*Directive* (TPD) sebagai mekanisme perlindungan sementara berhasil diwujudkan dalam praktik di Polandia. Penilaian ini tidak hanya berfokus pada keberhasilan kebijakan dalam memberikan perlindungan hukum dan akses terhadap layanan dasar, tetapi juga mempertimbangkan berbagai kendala yang muncul selama implementasinya serta dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh pengungsi maupun negara penerima.

Efektivitas suatu kebijakan dapat diukur melalui tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, kemampuan kebijakan dalam menjawab kebutuhan kelompok sasaran, serta keberlanjutan hasil yang dihasilkan setelah kebijakan diterapkan. Dalam konteks TPD, indikator efektivitas mencakup kemampuan kebijakan dalam memberikan perlindungan hukum secara cepat, menjamin akses terhadap pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan bantuan sosial, serta mendukung proses integrasi sosial-ekonomi pengungsi Ukraina di Polandia. Di sisi lain, analisis juga perlu memperhatikan berbagai keterbatasan implementasi, seperti tekanan terhadap kapasitas layanan publik, tantangan integrasi ekonomi, munculnya diskriminasi terhadap kelompok tertentu, serta keberlanjutan perlindungan ketika konflik berlangsung dalam jangka panjang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, analisis efektivitas TPD dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa aspek utama, yaitu efektivitas dalam memberikan perlindungan hukum dan administrasi, efektivitas dalam menjamin keamanan sosial-ekonomi pengungsi, dampak positif dan negatif kebijakan terhadap Polandia sebagai negara penerima, serta evaluasi menyeluruh terhadap keberhasilan implementasi TPD berdasarkan perspektif *human security*. Pembagian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana TPD mampu memenuhi tujuan perlindungan pengungsi sekaligus menjawab tantangan yang muncul selama pelaksanaannya.

#### **4.3 Indikator Keberhasilan Kebijakan Temporary Protection Directive (TPD)**

Tujuan utama diterapkannya *Temporary Protection Directive* (TPD) adalah memberikan perlindungan yang cepat kepada pengungsi yang melarikan diri dari konflik bersenjata tanpa melalui prosedur suaka yang panjang. Dalam konteks konflik Rusia–Ukraina, kebijakan ini menjadi instrumen pertama yang diaktifkan oleh Uni Eropa sejak disahkan pada tahun 2001. Aktivasi tersebut menunjukkan adanya perubahan pendekatan Uni Eropa dari mekanisme suaka individual menuju perlindungan kolektif yang lebih responsif terhadap krisis kemanusiaan berskala besar. Keberhasilan kebijakan ini dapat diukur melalui beberapa indikator, antara

lain kecepatan pemberian perlindungan hukum, akses terhadap layanan dasar, integrasi ke pasar tenaga kerja, serta kemampuan negara penerima dalam memenuhi kebutuhan dasar pengungsi.<sup>98</sup>

Untuk menilai efektivitas implementasi *Temporary Protection Directive* (TPD), diperlukan sejumlah indikator yang dapat menunjukkan sejauh mana tujuan kebijakan berhasil dicapai. Sebagai instrumen perlindungan sementara, *Temporary Protection Directive* (TPD) tidak hanya bertujuan memberikan legalitas tinggal kepada pengungsi, tetapi juga memastikan terpenuhinya berbagai hak dasar yang menjadi prasyarat bagi terciptanya keamanan manusia (*human security*). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi TPD dapat dianalisis melalui beberapa indikator utama, yaitu pemberian perlindungan hukum, akses terhadap pekerjaan, akses pendidikan, akses pelayanan kesehatan, serta pemberian bantuan sosial dan perlindungan sosial. Indikator-indikator tersebut dipilih karena secara langsung berkaitan dengan tujuan utama TPD sebagaimana diatur dalam Council Directive 2001/55/EC, yaitu menjamin bahwa pengungsi memperoleh perlindungan sementara beserta hak-hak dasar yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat selama berada di negara penerima. Dalam konteks Polandia, indikator tersebut juga menunjukkan sejauh mana kebijakan TPD mampu mendukung keamanan sosial-ekonomi pengungsi Ukraina.<sup>99</sup>

Keberhasilan implementasi *Temporary Protection Directive* (TPD) dapat diukur melalui sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan perlindungan yang cepat, menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pengungsi, serta mendukung proses integrasi sosial-ekonomi di negara penerima. Berbeda dengan mekanisme suaka konvensional yang memerlukan proses pemeriksaan individual dalam waktu yang relatif lama, TPD memungkinkan negara anggota Uni Eropa memberikan perlindungan secara kolektif kepada pengungsi yang melarikan diri akibat konflik bersenjata. Oleh karena itu, indikator keberhasilan TPD tidak hanya dilihat dari jumlah penerima perlindungan, tetapi juga dari efektivitas akses terhadap pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan kepastian hukum yang diberikan kepada para pengungsi.

#### **4.3.1. Perlindungan Hukum dan Legalitas Tinggal**

Indikator pertama keberhasilan implementasi TPD adalah kemampuannya memberikan perlindungan hukum dan kepastian status bagi pengungsi Ukraina.

---

<sup>98</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *International Migration Outlook 2022*, hlm. 38–45.

<sup>99</sup> United Nations High Commissioner for Refugees. (2025). *Ukraine Situation: Refugee Response Plan*, hlm. 14–21.

Melalui aktivasi Council Implementing Decision (EU) 2022/382, Uni Eropa memberikan status perlindungan sementara kepada warga Ukraina tanpa harus melalui prosedur suaka individual yang umumnya memerlukan waktu panjang. Kebijakan ini memberikan kepastian hukum sehingga pengungsi dapat tinggal secara legal, memperoleh hak bekerja, mengakses pelayanan publik, serta menikmati perlindungan yang diberikan oleh negara penerima.<sup>100</sup>

| <b>Tahun</b> | <b>Implementasi TPD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Data Pendukung</b>                                                                                                                                                                         | <b>Analisis Keberhasilan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022         | Uni Eropa mengaktifkan Council Implementing Decision (EU) 2022/382 yang memberikan status Temporary Protection kepada warga Ukraina. Pemerintah Polandia kemudian mengesahkan Special Act on Assistance to Ukrainian Citizens sebagai dasar hukum pemberian izin tinggal sementara, penerbitan nomor identitas PESEL, serta akses terhadap pekerjaan dan layanan publik. | Pada akhir tahun 2022, sekitar 1,3 juta warga Ukraina memperoleh perlindungan sementara di Polandia, menjadikannya negara dengan jumlah penerima Temporary Protection terbesar di Uni Eropa.. | Implementasi pada tahun pertama dapat dinilai berhasil karena mampu memberikan kepastian hukum secara cepat kepada jutaan pengungsi tanpa melalui prosedur suaka yang panjang. Kepastian status hukum juga menjadi dasar bagi pemenuhan hak-hak lainnya seperti bekerja, memperoleh pendidikan, dan mengakses pelayanan kesehatan. |
| 2023         | Pemerintah Polandia mempertahankan mekanisme pemberian perlindungan sementara serta memperkuat sistem administrasi melalui layanan digital, pembaruan data PESEL, dan koordinasi dengan                                                                                                                                                                                  | Berdasarkan European Commission (2023), Polandia tetap menjadi salah satu negara dengan jumlah penerima Temporary Protection terbesar di Uni Eropa serta mempertahankan akses terhadap hak    | Dibandingkan tahun 2022, implementasi menunjukkan peningkatan karena perlindungan hukum tidak hanya diberikan pada tahap awal kedatangan, tetapi juga diikuti dengan penguatan administrasi dan kepastian akses terhadap berbagai layanan publik.                                                                                  |

<sup>100</sup> European Commission, *Council Implementing Decision (EU) 2022/382*, 4 March 2022.

|      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik.                                                                                                                                             | tinggal dan layanan publik bagi pengungsi Ukraina.                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2024 | Uni Eropa memperpanjang masa berlaku Temporary Protection Directive sehingga pemerintah Polandia tetap memberikan legalitas tinggal beserta hak-hak dasar kepada pengungsi Ukraina.            | Menurut Eurostat (2024), Polandia masih menjadi salah satu negara dengan jumlah penerima Temporary Protection terbanyak di Uni Eropa dengan lebih dari 950.000 penerima perlindungan sementara. | Tahun 2024 menunjukkan keberhasilan yang signifikan karena perlindungan hukum tetap dipertahankan meskipun konflik berlangsung lebih lama. Perpanjangan status perlindungan memberikan kepastian bagi pengungsi untuk tetap tinggal, bekerja, dan mengakses pelayanan publik secara legal.                                                                                   |
| 2025 | Implementasi TPD terus berlanjut melalui perpanjangan perlindungan sementara oleh Uni Eropa serta keberlanjutan kebijakan nasional Polandia yang menjamin legalitas tinggal pengungsi Ukraina. | Berdasarkan UNHCR (2025), sekitar 4,3 juta warga Ukraina masih berada di bawah skema Temporary Protection di Uni Eropa, sementara sekitar 1 juta di antaranya berada di Polandia.               | Implementasi pada tahun 2025 dapat dinilai berhasil karena TPD mampu memberikan perlindungan hukum kepada jutaan pengungsi secara berkelanjutan. Dari perspektif Human Security, kondisi ini mencerminkan terpenuhinya dimensi personal security, karena kepastian hukum mengurangi risiko deportasi, penahanan, dan ketidakpastian status selama konflik masih berlangsung. |

**Tabel 4.1 Perkembangan Perlindungan Hukum dan Legalitas Tinggal Pengungsi Ukraina di Polandia Tahun 2022–2025**

Apabila dianalisis menggunakan perspektif Human Security, keberhasilan ini mencerminkan terpenuhinya dimensi personal security, karena kepastian hukum

mengurangi rasa takut terhadap deportasi, penahanan, maupun ketidakpastian status selama konflik di Ukraina masih berlangsung. Legalitas tersebut juga menjadi fondasi bagi pemenuhan hak-hak lainnya, seperti pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

#### 4.3.2 Keberhasilan dalam Mendorong Integrasi Pasar Tenaga Kerja

Indikator kedua keberhasilan implementasi *Temporary Protection Directive* (TPD) adalah terbukanya akses pengungsi terhadap pasar tenaga kerja. Salah satu karakteristik utama TPD adalah pemberian hak bekerja sejak awal kedatangan pengungsi tanpa harus menunggu proses penetapan status suaka. Kebijakan ini memungkinkan pengungsi memperoleh sumber pendapatan secara mandiri sehingga mengurangi ketergantungan terhadap bantuan kemanusiaan sekaligus mempercepat proses integrasi ekonomi.

| Tahun | Implementasi TPD                                                                                                                           | Data Pendukung                                                                                                         | Analisis Keberhasilan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022  | Pengungsi Ukraina memperoleh hak bekerja segera setelah mendapatkan status Temporary Protection tanpa melalui prosedur suaka yang panjang. | Polandia menjadi negara pertama yang membuka akses kerja secara luas bagi pengungsi Ukraina.                           | Implementasi pada tahun pertama dapat dinilai berhasil karena mampu mempercepat akses pengungsi ke pasar tenaga kerja sehingga mereka tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan. Namun, proses integrasi masih berada pada tahap awal dan banyak pengungsi masih menghadapi hambatan bahasa serta penyesuaian lingkungan kerja. |
| 2023  | Pemerintah memperluas program pelatihan bahasa, layanan penempatan kerja, dan pengakuan kualifikasi tenaga kerja.                          | Semakin banyak pengungsi bekerja pada sektor formal meskipun masih terdapat kendala pengakuan ijazah dan keterampilan. | Dibandingkan tahun 2022, implementasi menunjukkan peningkatan karena akses terhadap pekerjaan semakin luas dan proses integrasi mulai berjalan lebih baik melalui berbagai program pendukung yang disediakan pemerintah Polandia.                                                                                                          |
| 2024  | Tingkat integrasi ekonomi semakin meningkat dengan bertambahnya                                                                            | Tingkat pekerjaan pengungsi meningkat dari 61% menjadi 69%                                                             | Tahun 2024 menunjukkan keberhasilan yang signifikan karena pengungsi tidak hanya mampu memenuhi                                                                                                                                                                                                                                            |

|      |                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | jumlah pengungsi yang bekerja dan berkontribusi pada perekonomian nasional.                                                                                 | dan memberikan kontribusi sekitar 2,7% terhadap PDB Polandia.                                        | kebutuhan ekonomi secara mandiri, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Polandia. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi TPD mulai memberikan manfaat bagi pengungsi maupun negara penerima.                                                                                                                                          |
| 2025 | Program integrasi tenaga kerja terus dilanjutkan melalui peningkatan akses pekerjaan formal, pelatihan keterampilan, dan dukungan bagi pengusaha pengungsi. | Sekitar 69% pengungsi usia kerja telah bekerja, mendekati tingkat pekerjaan penduduk Polandia (75%). | Implementasi TPD pada tahun 2025 dapat dinilai sangat berhasil karena tingkat partisipasi kerja pengungsi terus meningkat dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa meningkatkan tingkat pengangguran maupun menurunkan upah pekerja lokal. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan TPD dalam menciptakan economic security bagi pengungsi mulai tercapai secara optimal. |

**Tabel 4.2 Perkembangan Keberhasilan Integrasi Pasar Tenaga Kerja Pengungsi Ukraina di Polandia Tahun 2022–2025**

Dalam perspektif Human Security, capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi TPD telah memperkuat economic security pengungsi melalui peningkatan kesempatan memperoleh pekerjaan, pendapatan, serta kemampuan memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

#### **4.3.3 Keberhasilan dalam Menjamin Akses Pendidikan**

Keberhasilan implementasi *Temporary Protection Directive* (TPD) juga dapat diukur melalui kemampuan negara penerima dalam menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak pengungsi. Berdasarkan ketentuan *Temporary Protection Directive* (TPD), seluruh anak pengungsi Ukraina memiliki hak untuk memperoleh pendidikan formal dengan perlakuan yang setara dengan warga negara di negara penerima. Di Polandia, pemerintah menyediakan akses ke

sekolah negeri, kelas bahasa Polandia, dukungan psikososial, serta berbagai program adaptasi guna membantu siswa pengungsi menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan yang baru.<sup>101</sup>

| <b>Tahun</b> | <b>Implementasi TPD</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Data Pendukung</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Analisis Keberhasilan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022         | Pemerintah Polandia mulai mengintegrasikan anak-anak pengungsi Ukraina ke dalam sistem pendidikan nasional melalui pemberian akses ke sekolah negeri serta penyelenggaraan kelas persiapan bahasa Polandia.     | Berdasarkan data UNESCO (2022), lebih dari 500.000 anak usia sekolah dari Ukraina berada di Polandia setelah invasi Rusia, sehingga pemerintah segera membuka akses pendidikan formal bagi mereka.       | Implementasi TPD pada tahun pertama dapat dinilai berhasil karena mampu menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak pengungsi yang sempat terhenti akibat konflik. Kebijakan ini mengurangi risiko kehilangan akses pendidikan ( <i>learning loss</i> ) serta memberikan rasa aman bagi anak-anak pengungsi.               |
| 2023         | Pemerintah memperluas kapasitas sekolah melalui penambahan guru pendamping, kelas bahasa Polandia, serta layanan psikososial bagi siswa pengungsi.                                                              | OECD (2023) melaporkan bahwa Polandia menjadi salah satu negara yang paling cepat mengintegrasikan anak-anak pengungsi Ukraina ke dalam sistem pendidikan nasional dibandingkan negara penerima lainnya. | Dibandingkan tahun 2022, implementasi menunjukkan peningkatan karena tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga mendukung proses adaptasi siswa melalui pembelajaran bahasa dan bantuan psikologis.                                                                                                                |
| 2024         | Program pendidikan terus diperkuat melalui peningkatan kerja sama antara pemerintah Polandia, Uni Eropa, UNICEF, dan UNHCR dalam penyediaan sarana belajar, pelatihan guru, serta dukungan pendidikan inklusif. | Menurut UNICEF (2024) dan European Commission (2024), ratusan ribu anak pengungsi Ukraina telah mengikuti pendidikan formal di Polandia, meskipun beberapa wilayah masih menghadapi keterbatasan         | Tahun 2024 menunjukkan keberhasilan yang cukup signifikan, karena akses pendidikan semakin luas dan kualitas layanan pendidikan mulai meningkat melalui dukungan berbagai organisasi internasional. Namun demikian, meningkatnya jumlah peserta didik masih menjadi tantangan bagi kapasitas sekolah di beberapa kota besar. |

<sup>101</sup> OECD, *Education at a Glance 2023*.

|      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                          | kapasitas sekolah.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025 | Pemerintah Polandia mempertahankan kebijakan wajib sekolah bagi anak-anak pengungsi yang berada di bawah skema Temporary Protection serta terus memperkuat program integrasi pendidikan. | Berdasarkan laporan UNHCR (2025), akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi Ukraina di Polandia tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam program perlindungan, dengan dukungan berkelanjutan dari Uni Eropa dan organisasi internasional. | Implementasi TPD pada tahun 2025 dapat dinilai sangat berhasil karena mampu menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak pengungsi secara berkelanjutan. Meskipun masih terdapat tantangan berupa keterbatasan kapasitas sekolah dan hambatan bahasa, kebijakan ini berhasil mendukung proses integrasi sosial serta meningkatkan community security sesuai perspektif Human Security. |

**Tabel 4.3 Perkembangan Keberhasilan Akses Pendidikan bagi Pengungsi Ukraina di Polandia Tahun 2022–2025**

Dalam perspektif Human Security, keberhasilan ini menunjukkan terpenuhinya dimensi community security, karena pendidikan menjadi sarana penting dalam membangun integrasi sosial, menjaga perkembangan anak, serta mendorong terciptanya kohesi sosial antara pengungsi dan masyarakat lokal.

#### **4.3.4 Keberhasilan dalam Menjamin Akses Pelayanan Kesehatan**

Indikator berikutnya adalah kemampuan TPD dalam menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan. Kebijakan ini memberikan hak kepada pengungsi Ukraina untuk memperoleh pelayanan kesehatan publik, termasuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan darurat, imunisasi, layanan ibu dan anak, serta dukungan kesehatan mental.

| <b>Tahun</b> | <b>Implementasi TPD</b>                                                                                                                                                             | <b>Data Pendukung</b>                                                                                                                                                         | <b>Analisis Keberhasilan</b>                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022         | Melalui implementasi Temporary Protection Directive (TPD), pengungsi Ukraina memperoleh hak mengakses sistem pelayanan kesehatan publik Polandia, termasuk layanan kesehatan dasar, | Berdasarkan WHO Europe (2022) dan European Commission (2022), pemerintah Polandia segera membuka akses pelayanan kesehatan bagi seluruh pengungsi Ukraina sejak awal aktivasi | Implementasi pada tahun pertama dinilai berhasil karena mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dasar pengungsi secara cepat. Akses terhadap pelayanan kesehatan menjadi langkah penting dalam mengurangi risiko penyakit serta dampak |

|      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>layanan darurat, imunisasi, serta pelayanan bagi ibu dan anak.</p>                                                                                                                                                      | <p>TPD.</p>                                                                                                                                                                                                                               | <p>kesehatan akibat perpindahan paksa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2023 | <p>Pemerintah Polandia memperluas pelayanan kesehatan melalui kerja sama dengan WHO, UNHCR, UNICEF, dan organisasi kemanusiaan lainnya, termasuk penyediaan layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial.</p>         | <p>Menurut WHO Europe (2023), ribuan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan di Polandia memperoleh dukungan tambahan untuk menangani meningkatnya jumlah pengungsi Ukraina.</p>                                                         | <p>Dibandingkan tahun 2022, implementasi menunjukkan peningkatan karena pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada kebutuhan fisik, tetapi juga mulai memberikan perhatian terhadap kesehatan mental dan trauma akibat konflik.</p>                                                                                                                  |
| 2024 | <p>Program pelayanan kesehatan terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, perluasan layanan psikososial, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah Polandia dan organisasi internasional.</p> | <p>WHO Europe (2024) melaporkan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan bagi pengungsi Ukraina di Polandia terus mengalami peningkatan, terutama pada layanan kesehatan primer dan kesehatan mental.</p>                                 | <p>Tahun 2024 menunjukkan keberhasilan yang signifikan karena cakupan pelayanan kesehatan semakin luas dan kualitas pelayanan semakin baik. Meskipun demikian, meningkatnya jumlah pengungsi masih memberikan tekanan terhadap kapasitas layanan kesehatan di beberapa wilayah.</p>                                                                     |
| 2025 | <p>Pemerintah Polandia tetap menjamin akses pelayanan kesehatan bagi penerima Temporary Protection melalui pembiayaan nasional yang didukung oleh Uni Eropa dan organisasi internasional.</p>                              | <p>Berdasarkan UNHCR (2025) dan WHO Europe (2025), pelayanan kesehatan tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam program perlindungan pengungsi Ukraina, termasuk layanan kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan vaksinasi.</p> | <p>Implementasi TPD pada tahun 2025 dapat dinilai sangat berhasil karena mampu menjaga keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi pengungsi serta meningkatkan kualitas perlindungan kesehatan secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi TPD berhasil memperkuat Health Security sebagaimana dijelaskan dalam teori Human Security.</p> |

**Tabel 4.4 Perkembangan Keberhasilan Akses Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi Ukraina di Polandia Tahun 2022–2025**

Dalam perspektif Human Security, kebijakan tersebut mencerminkan terpenuhinya dimensi health security, karena mampu mengurangi berbagai ancaman terhadap keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan individu yang timbul akibat konflik bersenjata.<sup>102</sup>

#### 4.3.5 Keberhasilan dalam Menjamin Perlindungan Sosial

Indikator terakhir keberhasilan implementasi TPD adalah kemampuan negara penerima dalam menyediakan perlindungan sosial bagi pengungsi. Di Polandia, penerima Temporary Protection memperoleh akses terhadap bantuan tempat tinggal, bantuan tunai, perlindungan sosial, serta berbagai program integrasi yang didukung oleh pemerintah, Uni Eropa, UNHCR, dan IOM.

| Tahun | Implementasi TPD                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data Pendukung                                                                                                                                                                    | Analisis Keberhasilan                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022  | Pemerintah Polandia mulai memberikan berbagai bentuk perlindungan sosial kepada pengungsi Ukraina, meliputi bantuan tempat tinggal sementara, bantuan tunai, akses terhadap bantuan keluarga, serta layanan sosial dasar melalui implementasi <i>Temporary Protection Directive</i> (TPD). | Berdasarkan European Commission (2022) dan UNHCR (2022), jutaan pengungsi memperoleh akses terhadap berbagai bentuk bantuan sosial segera setelah memasuki wilayah Polandia.      | Implementasi pada tahun pertama dinilai berhasil karena mampu memenuhi kebutuhan dasar pengungsi pada masa darurat. Bantuan sosial yang diberikan mengurangi kerentanan akibat kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, dan sumber pendapatan setelah meninggalkan Ukraina. |
| 2023  | Pemerintah Polandia memperluas program perlindungan sosial melalui kerja sama dengan Uni Eropa, UNHCR, IOM, dan berbagai organisasi kemanusiaan untuk memperkuat bantuan tunai, akomodasi, dan                                                                                             | IOM (2023) melaporkan bahwa semakin banyak pengungsi mulai memperoleh akses terhadap program integrasi sosial dan bantuan ekonomi, meskipun kebutuhan bantuan masih cukup tinggi. | Dibandingkan tahun 2022, implementasi menunjukkan peningkatan karena bantuan tidak lagi hanya berfokus pada kebutuhan darurat, tetapi mulai diarahkan untuk mendukung proses integrasi sosial dan kemandirian ekonomi pengungsi.                                         |

<sup>102</sup> WHO Europe, *Ukraine Emergency Response*, 2024.

|      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | layanan integrasi sosial.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2024 | Perlindungan sosial semakin diperkuat melalui peningkatan program bantuan ekonomi, dukungan tempat tinggal, serta layanan integrasi masyarakat yang melibatkan pemerintah daerah dan organisasi internasional. | Berdasarkan IOM (2024), kondisi sosial-ekonomi pengungsi mengalami peningkatan yang ditandai dengan bertambahnya jumlah pengungsi yang memperoleh pekerjaan, tempat tinggal yang lebih stabil, serta meningkatnya tingkat integrasi sosial di masyarakat Polandia.                                              | Tahun 2024 menunjukkan keberhasilan yang signifikan karena program perlindungan sosial tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mulai mendorong terciptanya stabilitas sosial dan ekonomi bagi pengungsi.                                                                                                                                                                                                                              |
| 2025 | Implementasi TPD tetap menjamin keberlanjutan perlindungan sosial melalui bantuan sosial, akses terhadap layanan publik, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi bagi pengungsi Ukraina.                   | Laporan UNHCR–Deloitte (2025) menunjukkan bahwa keberadaan pengungsi Ukraina berkontribusi sekitar 2,7% terhadap PDB Polandia pada tahun 2024, tanpa meningkatkan tingkat pengangguran maupun menurunkan upah pekerja lokal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses integrasi sosial-ekonomi semakin efektif. | Implementasi TPD pada tahun 2025 dapat dinilai sangat berhasil karena perlindungan sosial tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pengungsi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi negara penerima. Dari perspektif Human Security, kondisi ini mencerminkan terpenuhinya dimensi Economic Security dan Community Security, karena pengungsi mampu hidup lebih mandiri serta berintegrasi dengan masyarakat Polandia secara berkelanjutan. |

**Tabel 4.6 Perkembangan Keberhasilan Perlindungan Sosial bagi Pengungsi Ukraina di Polandia Tahun 2022–2025**

Dalam perspektif Human Security, capaian tersebut mencerminkan terpenuhinya dimensi economic security dan community security, karena perlindungan sosial tidak hanya mengurangi kerentanan ekonomi pengungsi, tetapi juga memperkuat integrasi mereka ke dalam kehidupan sosial masyarakat Polandia. Dengan demikian, implementasi TPD dapat dikatakan berhasil memenuhi sebagian

besar tujuan perlindungan sementara yang ditetapkan oleh Uni Eropa, meskipun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi agar integrasi pengungsi dapat berlangsung secara lebih inklusif dan berkelanjutan.<sup>103</sup>

#### **4.4 Dampak Positif Kebijakan Temporary Protection Directive**

Secara umum, implementasi TPD menunjukkan berbagai dampak positif baik bagi pengungsi maupun bagi Polandia sebagai negara penerima. Dari sisi pengungsi, kebijakan ini memberikan kepastian hukum, mempercepat akses terhadap pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta berbagai bentuk bantuan sosial. Kondisi tersebut memungkinkan pengungsi untuk segera membangun kembali kehidupan mereka tanpa harus menunggu proses penentuan status suaka yang sering kali berlangsung selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.<sup>104</sup>

Bagi Polandia, keberadaan pengungsi Ukraina juga memberikan manfaat ekonomi. Laporan bersama UNHCR dan Deloitte menunjukkan bahwa partisipasi aktif pengungsi di pasar tenaga kerja memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas ekonomi dan diperkirakan meningkatkan PDB Polandia sebesar sekitar 2,7% pada tahun 2024. Studi tersebut juga menyatakan bahwa kehadiran pengungsi Ukraina tidak menyebabkan peningkatan pengangguran maupun penurunan upah pekerja lokal.

Di samping itu, masuknya tenaga kerja Ukraina membantu mengatasi kekurangan pekerja yang telah lama dialami Polandia akibat penuaan penduduk dan migrasi tenaga kerja ke negara-negara Eropa Barat. Banyak pengungsi bekerja di sektor manufaktur, jasa, logistik, konstruksi, dan perawatan yang sebelumnya mengalami kekurangan tenaga kerja. Hal tersebut memperlihatkan bahwa TPD tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan kemanusiaan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi negara penerima.<sup>105</sup>

#### **4.5 Tantangan Kebijakan Temporary Protection Directive**

Walaupun Kebijakan TPD dinilai berhasil memberikan perlindungan secara cepat, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi berbagai keterbatasan. Salah satu tantangan utama adalah belum meratanya kualitas integrasi ekonomi. Banyak pengungsi Ukraina bekerja pada pekerjaan dengan tingkat keterampilan yang lebih rendah dibandingkan latar belakang pendidikan mereka. OECD mencatat bahwa sebagian besar pengungsi mengalami skills mismatch, sementara hambatan

---

<sup>103</sup> Reuters, "Ukrainian Refugees Give Poland Big Economic Boost, Report Says," 10 June 2025.

<sup>104</sup> UNHCR & Deloitte. (2025). *The Economic Impact of Ukrainian Refugees in Poland*.

<sup>105</sup> OECD. (2024). *International Migration Outlook 2024*, hlm. 46–58.

bahasa dan proses pengakuan ijazah masih membatasi akses terhadap pekerjaan yang lebih layak.<sup>106</sup>

Tantangan lainnya berkaitan dengan meningkatnya tekanan terhadap layanan publik Polandia. Masuknya jutaan pengungsi dalam waktu singkat menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan perumahan, pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial. Beban fiskal pemerintah juga meningkat karena harus menyediakan berbagai fasilitas bagi para pengungsi selama konflik masih berlangsung.<sup>107</sup>

Selain tantangan ekonomi, implementasi TPD juga memunculkan kritik mengenai adanya perbedaan perlakuan terhadap pengungsi Ukraina dibandingkan pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika. Banyak akademisi menilai bahwa respons cepat Uni Eropa terhadap pengungsi Ukraina menunjukkan adanya pengaruh faktor politik, kedekatan geografis, dan identitas budaya dalam kebijakan perlindungan pengungsi. Kritik tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan prinsip non-diskriminasi dalam rezim perlindungan pengungsi internasional.

Berdasarkan berbagai indikator tersebut, efektivitas TPD dapat dinilai cukup tinggi dalam memberikan perlindungan darurat (emergency protection), tetapi belum sepenuhnya berhasil menjamin integrasi sosial-ekonomi pengungsi dalam jangka panjang. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada pemberian status perlindungan sementara, tetapi juga pada kemampuan negara penerima mengembangkan kebijakan integrasi yang berkelanjutan setelah fase darurat berakhir.<sup>108</sup>

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi Temporary Protection Directive (TPD) di Polandia, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut secara umum berhasil memberikan perlindungan awal bagi pengungsi Ukraina. Aktivasi TPD memungkinkan pengungsi memperoleh akses secara cepat terhadap izin tinggal, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan berbagai bentuk bantuan sosial tanpa harus melalui prosedur suaka yang panjang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama TPD sebagai mekanisme perlindungan darurat telah tercapai.

Dari perspektif Human Security, implementasi TPD telah memberikan kontribusi positif terhadap beberapa dimensi keamanan manusia, terutama economic security, health security, personal security, dan community security.

---

<sup>106</sup> OECD. (2023). *International Migration Outlook 2023*, hlm. 62–74.

<sup>107</sup> OECD. (2026). *Ukraine's Strategic Response to the Displacement Crisis*, hlm. 201–220.

<sup>108</sup> NHCR. (2026). *Ukraine Emergency: Four Years On*.

Akses terhadap pasar tenaga kerja meningkatkan kemampuan pengungsi memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri, sedangkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan membantu menjaga kesejahteraan mereka selama berada di Polandia. Selain itu, legalitas tinggal yang diberikan melalui TPD menciptakan rasa aman bagi pengungsi karena mereka memperoleh perlindungan hukum yang jelas dari negara penerima.

Meskipun demikian, efektivitas kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi proses integrasi pengungsi, seperti hambatan bahasa, ketidaksesuaian pekerjaan dengan kompetensi yang dimiliki, keterbatasan pengakuan kualifikasi profesional, meningkatnya tekanan terhadap layanan publik, serta munculnya berbagai bentuk diskriminasi terhadap kelompok pengungsi tertentu. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan TPD masih lebih dominan pada tahap perlindungan darurat dibandingkan tahap integrasi jangka panjang.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa Temporary Protection Directive merupakan kebijakan yang efektif dalam memberikan perlindungan awal terhadap pengungsi Ukraina di Polandia. Akan tetapi, keberhasilan tersebut perlu diikuti oleh kebijakan integrasi yang lebih berkelanjutan agar perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu menjamin keamanan sosial-ekonomi pengungsi dalam jangka panjang sesuai dengan prinsip Human Security.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Konflik Rusia–Ukraina yang meningkat menjadi invasi skala penuh pada Februari 2022 telah memicu salah satu krisis pengungsi terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II. Polandia menjadi negara tujuan utama pengungsi Ukraina karena berbatasan langsung dengan Ukraina, memiliki kedekatan historis, geografis, dan sosial, serta menerapkan kebijakan yang relatif terbuka terhadap pengungsi. Lonjakan arus pengungsi dalam waktu yang singkat mendorong Uni Eropa mengaktifkan *Temporary Protection Directive* (TPD) sebagai mekanisme perlindungan darurat yang memungkinkan negara anggota memberikan perlindungan sementara tanpa melalui prosedur suaka yang panjang. Implementasi TPD di Polandia dilakukan melalui penyesuaian kebijakan nasional, khususnya melalui *Special Act on Assistance to Ukrainian Citizens*, yang memberikan dasar hukum bagi pemberian izin tinggal sementara, nomor identifikasi PESEL, akses terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, serta berbagai bentuk bantuan sosial. Pelaksanaan kebijakan tersebut juga didukung oleh pemerintah daerah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil sehingga proses perlindungan dapat berlangsung relatif cepat meskipun masih menghadapi berbagai tantangan administratif dan keterbatasan kapasitas layanan publik.

Berdasarkan analisis menggunakan perspektif *Human Security*, implementasi TPD memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan keamanan manusia (*Human Security*) pengungsi Ukraina, terutama pada dimensi *economic security*, *health security*, *personal security*, dan *community security*. Akses terhadap pasar tenaga kerja membantu meningkatkan kemandirian ekonomi pengungsi, sementara akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan perlindungan hukum memberikan rasa aman serta mendukung proses integrasi sosial mereka di Polandia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPD secara umum merupakan kebijakan yang efektif sebagai instrumen perlindungan sementara karena mampu mempercepat pemberian status hukum, mengurangi beban sistem suaka, serta menjamin pemenuhan berbagai hak sosial-ekonomi pengungsi.

Meskipun demikian, efektivitas implementasi TPD belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini menemukan masih adanya berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas pelayanan publik, hambatan bahasa, kesulitan pengakuan kualifikasi profesional, diskriminasi terhadap sebagian pengungsi non-Ukraina, serta tantangan integrasi sosial dan ekonomi dalam jangka panjang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan TPD tidak hanya ditentukan oleh

kerangka hukum Uni Eropa, tetapi juga sangat bergantung pada kapasitas negara penerima dalam menyediakan perlindungan yang berkelanjutan serta menciptakan lingkungan yang mendukung proses adaptasi pengungsi.

Apabila konflik Rusia–Ukraina terus berlanjut, Polandia diperkirakan akan tetap menghadapi tekanan yang besar sebagai negara penerima utama pengungsi Ukraina. Arus pengungsi yang terus meningkat berpotensi memberikan beban tambahan terhadap anggaran negara, kapasitas pelayanan publik, sistem kesehatan, pendidikan, penyediaan perumahan, serta pasar tenaga kerja. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut juga dapat memperlambat proses integrasi sosial-ekonomi pengungsi dan meningkatkan potensi ketegangan sosial apabila tidak diimbangi dengan kebijakan integrasi yang komprehensif serta dukungan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, keberlanjutan implementasi *Temporary Protection Directive* tidak hanya bergantung pada komitmen Uni Eropa, tetapi juga pada kemampuan pemerintah Polandia dalam memperkuat kapasitas institusi, menjaga stabilitas sosial-ekonomi, serta menyusun strategi integrasi jangka panjang bagi para pengungsi. Di sisi lain, diperlukan pula kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah Polandia, Uni Eropa, organisasi internasional, dan masyarakat sipil agar perlindungan terhadap pengungsi tetap berjalan secara efektif tanpa mengurangi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat di negara penerima.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *Temporary Protection Directive* merupakan kebijakan yang berhasil memberikan perlindungan darurat secara cepat bagi pengungsi Ukraina di Polandia serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kondisi sosial-ekonomi dan keamanan manusia mereka. Namun demikian, apabila konflik berlangsung dalam jangka panjang, implementasi TPD perlu diikuti dengan kebijakan integrasi yang lebih berkelanjutan agar perlindungan yang diberikan tidak hanya mampu menjawab kebutuhan darurat, tetapi juga mendukung terciptanya stabilitas sosial-ekonomi bagi pengungsi maupun negara penerima dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Addie Esposito. (2022). *The Limitations of Humanity: Differential Refugee Treatment in the EU*.
- Amnesty International. (2021). *Greece: Violence, Pushbacks and Inhumane Conditions for Asylum Seekers*. London: Amnesty International.
- Amnesty International. (2022). *Poland: Human rights, needs and discrimination—The situation of Roma refugees from Ukraine in Poland*.
- Axios. (2022, March 8). *#AfricansInUkraine: Escaping students describe rejection at the border*.
- Beirens, H., Maas, S., & Petronella, S. (2022). *Responding to the Ukraine Refugee Crisis*. Migration Policy Institute Europe.
- Betts, A. (2017). *Refuge: Transforming a Broken Refugee System*. London: Allen Lane.
- Carrera, S., Ineli-Ciger, M., Vosyliūtė, L., & Brumat, L. (2022). *The EU Grants Temporary Protection for People Fleeing War in Ukraine: Time to Rethink Unequal Solidarity in EU Asylum Policy*. Brussels: Centre for European Policy Studies (CEPS).
- Castles, S., de Haas, H., & Miller, M. J. (2020). *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World* (6th ed.). Guilford Press.
- Council of the European Union. (2022). *Council Implementing Decision (EU) 2022/382 of 4 March 2022 Establishing the Existence of a Mass Influx of Displaced Persons from Ukraine within the Meaning of Article 5 of Directive 2001/55/EC, and Having the Effect of Introducing Temporary Protection*. Brussels: Council of the European Union.
- Demchuk, K., & Krayevska, O. (2023). *The Transformation of Polish-Ukrainian Relations in the Context of Migration Policy Implementation*. *Studia Europejskie – Studies in European Affairs*, 2023(4).
- Duszczuk, M., & Kaczmarczyk, P. (2022). *The War in Ukraine and Migration to Poland*. *Inter Economics*, 57(3), 164–170.

- European Commission. (2023). *Temporary Protection for People Fleeing Ukraine*. Brussels.
- Eurostat. (2021). *Asylum Decisions in the EU*. Luxembourg: Eurostat.
- Eurostat. (2024). *Temporary Protection for Persons Fleeing Ukraine – Monthly Statistics*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Goodwin-Gill, G. S., & McAdam, J. (2021). *The Refugee in International Law* (4th ed.). Oxford University Press.
- International Organization for Migration. (2014). *Ukraine Internal Displacement Report: Round 1*. IOM.
- International Organization for Migration. (2015–2023). *Ukraine Internal Displacement Reports* (Various Rounds). IOM.
- International Organization for Migration. (2024). *Poland—Economic Inclusion and Livelihoods of Refugees from Ukraine (October–December 2024)*. Displacement Tracking Matrix.
- International Organization for Migration. (2024). *Poland—Integration Snapshot: Changes in Employment, Accommodation, and Social Integration for Refugees from Ukraine*. Displacement Tracking Matrix.
- Knapik, W., Luty, L., Ziolo, M., & Odlanicka-Poczobutt, M. (2024). *Migrants from Ukraine in the Polish Labour Market as Perceived by Poles from Rural Areas and Towns*.
- Kuzio, T. (2022). *Russian Nationalism and the War in Ukraine*. *Journal of Soviet and Post-Soviet Politics*.
- Łukasz Postek., & Małgorzata Walerych. (2025). *The Impact of Immigration Shocks on the Labour Market in Poland*. SURF Policy Brief No. 1125.
- Merlinda Putri Wijayanti. (2024). *Kasus Krisis Pengungsi di Ukraina akibat Invasi Rusia Tahun 2022–2023*. Universitas Islam Indonesia.
- Natasya Angel Dharmaputra., Petsy Jessy Ismoyo., & Christian H. J. de Frestes. (2025). *Implikasi Konflik Rusia-Ukraina terhadap Migrasi di Kawasan Uni Eropa*. Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

OECD. (2023). *What We Know about the Skills and Early Labour Market Outcomes of Refugees from Ukraine*. Paris: OECD Publishing.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2022). *Report on the Human Rights Situation in Ukraine*. Geneva: OHCHR.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *OECD Economic Surveys: Poland 2023*. OECD Publishing.

Pramanda, F. B. (2025). *Analisis Kebijakan Polandia Menerima Pengungsi Ukraina* (Skripsi Sarjana, Program Studi Hubungan Internasional).

UNHCR. (2024). *Ukraine Refugee Situation*.

United Nations Development Programme. (1994). *Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security*. New York: Oxford University Press.

United Nations High Commissioner for Refugees. (2025). *Analysis of the Impact of Refugees from Ukraine on the Economy of Poland* (2nd ed.). Geneva: UNHCR.

United Nations High Commissioner for Refugees. (2025). *Refugees Generated a Stunning 2.7 Percent of Poland's GDP in 2024, Study Shows*.

United Nations. (2018). *Human Security Handbook*. New York: United Nations.

United Nations. (2022). *Humanitarian Impact of the War in Ukraine*.

World Bank. (2023). *Supporting the Social and Economic Integration of Ukrainian Refugees in Poland*. World Bank Group.

## Berita Acara Bimbingan

7/8/26, 7:40 PM

Universitas Budi Luhur & Akademi Sekretari Budi Luhur

### Kartu Bimbingan Mahasiswa



N I M : 1942500388  
NAMA : Raihan Fajar Indarto  
Dosen Pembimbing : Anggun Puspitasari, S.I.P, M.Si.  
Judul Skripsi : ANALISIS KEBIJAKAN TEMPORARY PROTECTION DIRECTIVE (TPD) TERHADAP PERLINDUNGAN PENGUNGSI KONFLIK UKRAINA-RUSIA DI POLANDIA

| No | Tanggal    | Materi                        |
|----|------------|-------------------------------|
| 1  | 02-04-2026 | Pertemuan 1, konsultasi judul |
| 2  | 05-04-2026 | Review Latar Belakang         |
| 3  | 10-04-2026 | Review Teori                  |
| 4  | 25-04-2026 | Review Bab 1                  |
| 5  | 30-04-2026 | Revisi Bab 1, Outline Bab 2   |
| 6  | 05-05-2026 | Revisi Bab 2                  |
| 7  | 10-05-2026 | Konsultasi data               |
| 8  | 15-05-2026 | Review Bab 3                  |
| 9  | 30-05-2026 | Review Bab 4                  |
| 10 | 15-06-2026 | Revisi Bab 4                  |
| 11 | 05-07-2026 | ACC Sidang                    |

Mahasiswa diatas melakukan bimbingan dengan jumlah materi yang telah mencukupi untuk disidangkan.

Mahasiswa

(Raihan Fajar Indarto)